

**ASPEK MORALITAS, KEPATUHAN, DAN PEMAHAMAN WAJIB PAJAK
PRIBADI DALAM PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN
(Studi Kasus Pada Dosen UIN Alauddin Makassar)**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar**

Oleh:
NURLINA
NIM: 10800110062

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
2014**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **NURLINA**, Nim: **10800110062**, Mahasiswa Program Studi Strata Satu (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul **“Aspek Moralitas, Kepatuhan Dan Pemahaman Wajib Pajak Pribadi Dalam Pelaporan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada Dosen UIN Alauddin Makassar)”**, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan dan diproses selanjutnya.

Makassar, 15 September 2014

Pembimbing I

Pembimbing II

Mustakim Muchlis, S.E., M.Si.
NIP.19840618 201101 1 009

Hasbiullah SE., M.Si.
NIP. 19721204 200801 1 008

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul " **Aspek Moralitas, Kepatuhan, Pemahaman Wajib Pajak Pribadi Dalam Pelaporan Pajak Penghasilan (Studi Pada Dosen UIN Alauddin Makassar)**", yang disusun oleh **Nurlina**, NIM: **10800110062**, mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan hari Rabu, 17 September 2014 M bertepatan dengan 22 Dzulkaidah 1435 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Jurusan Akuntansi, dengan beberapa perbaikan.


Makassar, Rabu, 17 September 2014 M
Rabu, 22 Dzulkaidah 1435 H



DEWAN PENGUJI

Ketua Majelis	: Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Jamaluddin M, SE., M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Mustakim Muchlis, SE., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Hasbiullah, SE., M.Si	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd	(.....)
Munaqisy II	: Lince Bulutoding, S.E., M.Si., Ak	(.....)

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag.
NIP : 19581022 198703 1 002

KATA PENGANTAR



Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan hanya kepada Allah (Subhanahu Wata'ala) yang telah memberikan kesehatan, kesabaran, kekuatan serta ilmu pengetahuan yang Kau limpahkan. Atas perkenaan-Mu jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam "Allahumma Sholli Ala Sayyidina Muhammad" juga penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Skripsi dengan judul **"Aspek Moralitas, Kepatuhan, Pemahaman Wajib Pajak Dalam Pelaporan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada Dosen UIN Alauddin Makassar)"** penulis hadirkan sebagai salah satu prasyarat untuk menyelesaikan studi S1 dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Selama penyusunan skripsi ini, tidak dapat lepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan baik material maupun spiritual dari berbagai pihak, oleh karena itu perkenankanlah penulis menghanturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Qadir Gassing, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Jamaluddin Madjid, S.E, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan Bapak Memen Suwandi S.E, M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi UIN Alauddin Makassar.

4. Bapak H. Abdul Wahid Haddade, Lc., M.HI, selaku Penasihat Akademik yang selalu memberikan nasihat.
5. Bapak Mustakim Muchlis, S.E., M.Si, sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran yang berguna selama proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Hasbiullah, SE., M.Si, selaku dosen pembimbing II yang juga telah memberikan pengarahan, bimbingan saran yang berguna selama proses penyelesaian skripsi ini.
7. Segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang telah memberikan bekal dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
8. Bapak Rektor dan Bapak Dekan Fakultas serta dosen yang memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan membantu selama proses penelitian.
9. Ayahanda Agus dan Ibunda Suriyani yang telah melahirkan dan membimbing saya selama ini, atas segala doa dan pengorbanannya baik secara materi maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
10. Keluarga tercinta, kakak Mawar, dan adik Nurul yang selalu memberikan motivasi dan semangat akan terselesaikannya skripsi ini.
11. Sahabat dekatku, Raodatul Uslifah, Purwanto Wahyudi, Nur Aminah, Nur Asiah, Muh. Amri, Muh. Ayyub, Nuraeni, Nurhijrah. S, Nur Annisa, Sri Astuti, Sugitha, Riana Nugrah Wardani, Wirdayani, Rikanyta Pri Ramadani, Sri Ayu, Syahrani, Sri Wahyuni, Nur Rafika Kadir, Wahyuni, Nirwana, Syamsinar, Panny Rahmi, Nur Arini Susanti, Saddam Husain, Syamsuddin, Winarno, Muh. Fardan Ngoyo, Ashari Assagaf, Nanang Nofriandi, Syamsu Alam, Muh. Fajrin, yang telah berkorban banyak baik materi maupun berupa moril sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

12. Teman-teman KKN Angkatan 49, Posko 3 Kel. Empang Utara, Kec. Binamu Kab. Jeneponto, LZ Nur Hasanah DH, Abd. Jabbar, Muh.Hidayat, Rahmat Hidayat, Syamsul terima kasih atas dukungan dan inspirasinya teman-teman.
13. Semua teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang turut memberikan bantuan dan pengertian secara tulus.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan guna menyempurnakan skripsi ini.

Wassalamu' alaikum Wr. Wb

Makassar,

NURLINA

NIM. 10800110062

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
ABSTRAK	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	 1-14
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Penelitian	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
 BAB II : TINJAUAN TEORETIS	 15-35
A. Theory of Planned Behaviour.....	15
B. Pajak Penghasilan	19
C. Moralitas Pajak.....	27
D. Kepatuhan Pajak	29
E. Pemahaman Pajak.....	32
 BAB III : METODE PENELITIAN.....	 36-45
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian.....	37
C. Sumber Data	37
D. Metode Pengumpulan Data	38
E. Instrumen Penelitian	39
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	40
G. Pengujian Keabsahan Data.....	41
 BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 46-76
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	46
B. Pelaporan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi (Dosen) dilihat dari aspek moral, kepatuhan dan pemahaman pajak di UIN Alauddin Makassar... ..	52

BAB V	: PENUTUP.....	77-79
	A. Kesimpulan.....	77
	B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA		80
LAMPIRAN		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Penerimaan pajak penghasilan	3
Gambar 2.1 : Rerangka konseptual	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 :Data Informan	38
--------------------------------	----

ABSTRAK

Nama : Nurlina
Nim : 10800110062
Judul : Aspek Moralitas, Kepatuhan Dan Pemahaman Wajib Pajak Pribadi Dalam Pelaporan Penghasilan (Studi Pada Dosen UIN Alauddin Makassar)

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui moralitas perpajakan, kepatuhan, dan pemahaman pajak oleh wajib pajak pribadi dalam pelaporan SPT tahunan terkait dengan penghasilan. Informasi dan data dalam penelitian ini merupakan data primer (*primary data*). Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara kepada beberapa informan yang merupakan dosen dari UIN Alauddin Makassar..

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini tidak mengeneralikan tetapi hanya terbatas pada informan yang memberikan informasi. Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian-penelitian sebelumnya untuk mengetahui bagaimana aspek moral, kepatuhan terhadap aturan dan pemahaman tentang pajak dalam pelaporan pajak penghasilan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode survei dan observasi. Analisis data dilakukan dengan melakukan reduksi data kemudian menyajikan data dan menarik kesimpulan. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi teknik yang mana dilakukan dengan wawancara kemudian dilakukan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek moral berperan penting dalam pelaporan pajak penghasilan, yang mana dalam pelaporan dan pembayaran pajak diperlukan kesadaran dan kejujuran wajib pajak. Aspek kepatuhan terhadap pajak masih tinggi disebabkan karena wajib pajak berada dalam suatu instansi. Dari aspek pemahaman, wajib pajak memiliki pemahaman dalam melaporkan pajak penghasilan dalam surat pemberitahuan. Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang luas kepada wajib pajak untuk lebih memahami tentang pajak dan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintahan atau otoritas pajak sehingga dapat memberikan sosialisasi dan penyuluhan mengenai pajak penghasilan sehingga penerimaan pajak dapat dioptimalkan.

Kata Kunci : Theory of Planned Behaviour, Moralitas Pajak, Kepatuhan Pajak, Pemahaman Pajak, Pajak Penghasilan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh negara kepada rakyat yang bersifat memaksa. Pemungutan pajak didasarkan atas undang-undang yang berlaku bagi setiap wajib pajak, baik bersifat badan maupun pribadi. Pajak memiliki peranan utama dalam pembangunan dan pembiayaan pengeluaran pemerintah dengan maksud mensejahterakan rakyat.

Kebutuhan pembangunan yang semakin hari semakin meningkat dan permasalahan ekonomi negara mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai upaya dalam mendapatkan penerimaan negara. Penerimaan kas negara tidak hanya dari pajak tetapi juga non pajak seperti bantuan dari luar negeri ataupun hibah. Pajak merupakan salah satu penopang dana terbesar negara. Pajak digunakan untuk pembangunan fasilitas negara, seperti jalan, jembatan, sekolah dan fasilitas lainnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan negara dapat dilihat dari berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Peraturan perundang-undangan terkait dengan pajak penghasilan dan dasar perhitungan pajak selalu dirubah. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 disahkan pada tanggal 23 September 2008 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang “Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan”,

menyebutkan bahwa wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Adanya perubahan peraturan perpajakan nasional yang paling mendasar dan penting adalah pelaksanaan pemungutan pajak, yaitu perubahan dari *official Assesment System* menjadi *Self Assesment System* (Tresno dkk:1). Perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assesment System* yang mana wajib pajak diberikan wewenang untuk melaporkan dan membayar sendiri kewajiban pajak. Tentu sistem yang digunakan memerlukan kejujuran dan kesadaran wajib pajak dari perhitungan pajak sampai pelaporan dalam SPT tahunan.

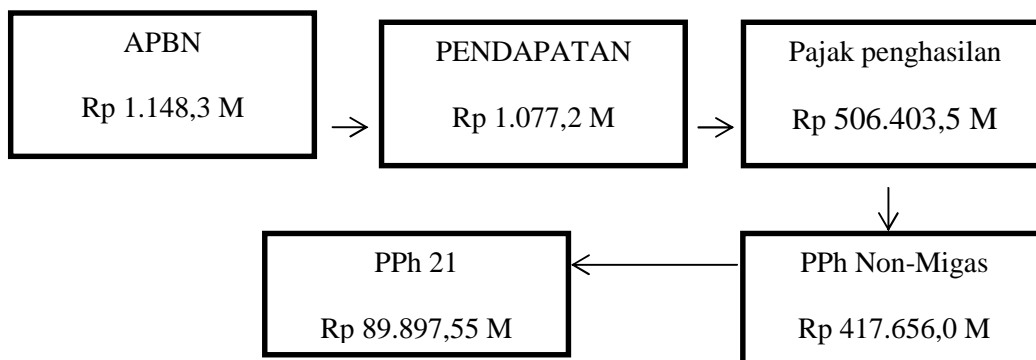
Pemungutan pajak di Indonesia masih sulit untuk direalisasi secara optimal disebabkan karena kesadaran dan kemauan masyarakat untuk pembayaran pajak masih minim. Kesadaran dan kemauan masyarakat untuk memahami dan membayar pajak disebabkan karena anggapan bahwa pajak yang dibayarkan tidak secara langsung dinikmati dan dilihat hasilnya. Disamping itu, berbagai permasalahan yang muncul dari pemerintah seperti kasus korupsi mendorong masyarakat untuk tidak patuh terhadap aturan perpajakan

Pada tahun 2012, penerimaan pajak meleset dari target APBN-perubahan yang mana penerimaan pajak hingga akhir Desember mencapai Rp 980,1 triliun atau 3,6 persen lebih rendah dari target sebesar Rp 1.016,2 triliun. Hal ini disebabkan karena tidak tercapainya target penerimaan PPh non migas, pajak lainnya dan bea keluar. Menteri keuangan memaparkan bahwa pajak penghasilan mencapai Rp 464,7 triliun atau 90,3 persen dari target Rp 513,7 triliun dan bea keluar mencapai Rp 21,2 triliun

atau 91,5 persen dari target Rp 23,2 triliun. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2011, maka realisasi penerimaan PPh Tahun 2012 mengalami pertumbuhan sebesar 7,79% (Kompas, 2013).

Pada tahun 2013 penerimaan berdasarkan sektor pajak mencapai 93,8 persen atau sebesar Rp 1.077.257,4 miliar dari APBN perubahan sebesar Rp 1.148.364,7 miliar. Penerimaan pajak dalam negeri masih didominasi oleh PPh dan PPN. Pajak penghasilan mencapai 94,0 persen dari realisasi penerimaan sebesar Rp 506.403,5 dengan APBN sebesar Rp 586.306,5 miliar. Apabila dibandingkan dengan target APBN 2013, proyeksi PPh sebesar Rp530.743,5 miliar tersebut menunjukkan penurunan sebesar 9,3 persen, terutama berasal dari penurunan PPh nonmigas. Hal tersebut terkait dengan lebih rendahnya perkiraan pertumbuhan ekonomi dalam RAPBNP 2013 jika dibandingkan target pada APBN 2013. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan realisasinya dalam tahun 2012, proyeksi penerimaan PPh dalam RAPBNP 2013 masih mengalami pertumbuhan sebesar 14,2 persen (Kementrian Keuangan, 2013) .

Berikut gambaran penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yang mencapai 88,11 persen untuk tahun 2013.



(Gambar 2.1)

Belum tercapainya APBN disebabkan karena berbagai permasalahan ekonomi, hukum dan faktor lainnya. Kebijakan yang efektif bagi wajib pajak orang pribadi seharusnya tidak hanya menekankan pada aspek ekonomi semata (seperti ancaman denda dan pemeriksaan) namun juga memperhatikan aspek keperilakuan (*behavioral*). Moral perpajakan merupakan determinan kunci yang dapat menjelaskan mengapa orang jujur dalam masalah perpajakan. Sedangkan kepatuhan perpajakan (*tax compliance*) dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2000 dalam Cahyonawati, 2011: 162).

Upaya pendidikan, penyuluhan dan sebagainya tidak banyak berarti dalam membangun kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk ikut serta dalam meningkatkan penerimaan pajak. Masyarakat cenderung menghindari pelaporan dan pembayaran pajak dengan anggapan bahwa mereka tidak menikmati dan merasakan manfaat secara langsung dari pembayaran pajak. Disisi lain ancaman, hukuman, maupun sanksi dalam Undang-undang sudah cukup jelas terhadap wajib pajak yang bandel mengabaikan kewajiban pajak (Hardiningsih, 2011:127). Akan tetapi aturan tersebut tidak sertamerta diindahkan oleh masyarakat khususnya wajib pajak orang pribadi yang sudah seharusnya melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan aturan pajak yang berlaku.

Pembangunan yang diharapkan mampu meningkatkan taraf penghidupan masyarakat, pada kenyataannya tidak terwujud secara optimal karena pembiayaan pembangunan yang bersumber dari penerimaan pajak mengalami kendala akibat sejumlah permasalahan perpajakan yang semakin masif (Ardi, 2012:45-46).

Kepercayaan wajib pajak orang pribadi merupakan salah satu yang harus diupayakan pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh James Alm et al., (2005) yang dilakukan di Rusia sebelum, selama dan sesudah masa transisi perubahan sistem pemerintahan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak karena kebanggaan nasional dan kepercayaan kepada sistem pemerintahan yang tinggi dari pemanfaatan pajak tersebut. Sedangkan dalam penelitian Henriket et al., (2005) yang dilakukan di Swedia mengemukakan bahwa ketidakpercayaan Wajib Pajak terhadap politisi terkemuka akan berpengaruh pada kemauan membayar pajak memburuk dan kemungkinan mengumpulkan pajak untuk menjaga kesejahteraan negara dikurangi (Handayani dkk: 4).

Penelitian dari Tarjo dan Indra Kusumawati (2006) meneliti tentang analisis perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap pelaksanaan *self assessment system*. Hasilnya penerapan *self assessment system* di Bangkalan belum berjalan secara baik, meski pada fungsi membayar sudah baik. Untuk fungsi melapor WP sudah melaksanakan fungsinya, namun mereka melapor bukan karena kesadaran tapi karena adanya denda. Dari fungsi fiskus, *self assessment system* yang diterapkan di Bangkalan belum berjalan dengan baik, ini dibuktikan dengan informasi tentang penyuluhan yang tidak merata. Selain itu fungsi pengawasan yang dilakukan oleh fiskus sulit diukur dari persepsi WP. Untuk fungsi pelayanan, ternyata mereka sering datang ke KPP adalah WP yang fungsi perhitungannya dilakukan oleh fiskus.

Penelitian yang dilakukan oleh Chaerunnisa tentang pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT untuk wajib pajak pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penghasilan dan sanksi memiliki hubungan

melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak akan dikelola oleh otoritas pajak untuk tujuan pembangunan nasional, pengadaan fasilitas negara, seperti sekolah, mesjid, jalanan, gedung sekolah, dan lain sebagainya yang akan digunakan oleh semua warga negara.

Pajak penghasilan pribadi memberikan kontribusi besar dalam penerimaan negara. Optimalisasi penerimaan pajak dapat ditingkatkan melalui pemungutan pajak penghasilan yang berkaitan dengan pekerjaan bebas. Penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan bebas dilaporkan dalam surat pemberitahuan dan dibayarkan pajaknya dengan cara disetahunkan. Pelaporan dan pembayaran pajak atas penghasilan dari pekerjaan bebas tersebut dapat meningkatkan penerimaan pajak. Dilihat dari wilayah kampus UIN Alauddin Makassar, wajib pajak dalam hal ini dosen tidak hanya berperan sebagai pengajar, namun sebagian besar memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan bebas atau pekerjaan atas keahlian yang dimiliki. Dosen tidak hanya bekerja sebagai pengajar namun juga memiliki pekerjaan lain diluar dari pekerjaan utamanya. Banyak dosen UIN Alauddin Makassar yang berprofesi sebagai auditor, penulis, penceramah dan pekerjaan jasa lainnya yang penghasilannya diluar dari gaji pokok. Penghasilan-penghasilan tersebut harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2013 dan dikenakan pajak. Dengan melihat fenomena tersebut, maka penulis terdorong untuk meneliti perilaku wajib pajak pribadi atas penghasilan dari pekerjaan bebas yang diukur dengan menggunakan *Theory Of Planned Behaviour* dengan judul “ aspek moralitas, kepatuhan dan pemahaman wajib pajak pribadi dalam pelaporan pajak penghasilan (studi kasus pada dosen UIN Alauddin Makassar) .

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Penelitian

Penetapan fokus dalam penelitian kualitatif sangat penting, selain itu membatasi studi (membatasi bidang inkuiri), melalui bimbingan dan arahan fokus pula seorang peneliti tahu persis data mana dan data tentang apa yang perlu dikumpulkan dan data mana pula, yang walaupun menarik karena tidak relevan, tidak perlu dimasukkan dalam ke dalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan (Moleong, 2009:94). Basrowi dan Suwandi (2008:67) menyatakan bahwa penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas dalam penelitiannya atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian.

Penentuan fokus suatu penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau memasukkan mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Perumusan fokus atau masalah dalam penelitian kualitatif ini bersifat tentatif artinya penyempurnaan rumusan fokus atau masalah itu masih tetap dilakukan sewaktu penelitian sudah berada di lapangan, bahkan seringkali disamakan dengan masalah yang akan dirumuskan dan menjadi acuan dalam penentuan

Fokus utama dalam penelitian ini mengenai:

1. Moralitas pajak wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan penghasilan pajaknya. Moralitas pajak didasarkan motivasi intrinsik (kesadaran dan kejujuran) wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan penghasilannya dalam SPT tahunan.
2. Kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi terhadap aturan perpajakan.
3. Pemahaman wajib pajak orang pribadi mengenai pajak.

Penelitian ini dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan diluar dari pekerjaan utamanya. Penelitian ini dilakukan dengan melihat fenomena yang ada, yang mana wajib pajak orang pribadi memiliki beberapa pekerjaan namun yang dilaporkan dalam SPT tahunan hanya pekerjaan utamanya saja. Yang mana seharusnya semua penghasilan dan penambahan harta lainnya dikalkulasikan untuk menghitung pajak yang seharusnya dibayarkan sesuai dengan peraturan perpajakan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, pokok permasalahan dalam penelitian ini mengenai bagaimana aspek moralitas, kepatuhan, dan pemahaman wajib pajak pribadi dalam pelaporan pajak penghasilan dosen.

D. Kajian Pustaka

Beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan wajib pajak pribadi yaitu,

Dewi Rina Komarawati dan Mukhtaruddin tentang tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap tingkat penerimaan pajak di Kabupaten Lahat yang menggunakan kepatuhan WP sebagai variabel independen dan jumlah penerimaan pajak penghasilan sebagai variabel dependen dengan menggunakan metode analisis regresi berganda. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya terhadap perubahan penerimaan pajak pada KPP Lahat.

Chaeerunnisa dengan judul analisis pengaruh tingkat penghasilan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan untuk wajib pajak orang pribadi di wilayah Kembangan Jawa Barat. Metode analisis yang digunakan adalah metode regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa secara simultan terdapat pengaruh dari variabel tingkat penghasilan dan saksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan.

Cindy Jotopurnomo dan **Yenni Mangoting** tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi berganda. Hasil menunjukkan secara simultan kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan lingkungan Wajib Pajak berada berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Sawahan Surabaya.

Nurcahyoni tentang model moral dan kepatuhan perpajakan: wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menemukan bahwa tingkat moral wajib pajak di Indonesia belum tumbuh dari motivasi intrinsik individu melainkan paksaan dari faktor eksternal yaitu oleh besarnya denda pajak. Metode analisis yang digunakan *Component based-Structural Equation Modelling* (SEM) atau yang dikenal sebagai *Partial Least Square* (PLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak di Indonesia adalah kepatuhan yang dipaksakan yang disebabkan oleh adanya kemungkinan pemeriksaan pajak dan ancaman denda yang tinggi dan belum pada tahap kepatuhan perpajakan secara sukarela.

Oktaviane Lidya Winerungan tentang sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. variabel bebas (*independent variable*) yaitu sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan, dengan variabel terikat (*dependent variable*) yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Analisis data menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan *software* SPSS 17 dengan empat tahap. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado dan KPP Pratama Bitung.

Winda Kurnia Fikriningrum tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak (studi kasus pada kantor pelayanan pajak pratama Semarang Candisari). Variabel independen dalam penelitian ini adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan pelayanan fiskus. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kemauan membayar pajak. Analisis dalam penelitian ini menggunakan persamaan regresi linier berganda. Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Widi Hidayat Argo Adhi Nugroho tentang studi empiris *theory of planned behavior* dan pengaruh kewajiban moral pada perilaku ketidakpatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM). Hasil penelitian menghasilkan kesimpulan, pertama, sikap terhadap ketidakpatuhan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap niat untuk tidak patuh terhadap pajak. Kedua, norma subyektif berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap niat untuk tidak patuh terhadap pajak. Ketiga, kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat untuk tidak patuh terhadap pajak. Keempat, PBC berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap niat untuk tidak

patuh terhadap pajak. Kelima, PBC berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak. Keenam, niat seseorang untuk tidak patuh terhadap pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak.

Sapti Wuri Handayani, Agus Faturekhman dan Umi Pratiwi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Variabel independen meliputi kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum sedangkan kemauan membayar pajak sebagai variabel dependen, metode yang digunakan adalah metode analisis berganda. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum secara simultan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek moralitas, kepatuhan, dan pemahaman wajib pajak pribadi dalam pelaporan pajak penghasilan.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang perpajakan. Disamping itu penelitian ini juga

diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan teori yang ada, terutama terkait dengan moral perpajakan wajib pajak orang pribadi.

b. Manfaat praktis

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang luas bagi peneliti terkait pentingnya pemahaman tentang pajak yang merupakan kewajiban bagi negara. Pemahaman dan ilmu yang luas merupakan suatu yang diharapkan semua orang, dan juga peneliti merupakan calon wajib pajak pribadi. Sepatutnya mengetahui dan memahami lebih jauh terkait dengan perpajakan, terutama moral yang berkaitan dengan kejujuran dan kesadaran bukan karena denda dan teguran akan tetapi kesadaran intrinsik yang merupakan kesadaran dari dalam diri sendiri untuk melaksanakan kewajibannya.

2. Bagi wajib pajak pribadi/ pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada wajib pajak orang pribadi pada khususnya dan pembaca pada umumnya agar lebih memahami tentang aturan perpajakan. Sehingga dalam pelaporan dan pembayaran pajak dilakukan sesuai dengan aturan, serta kejujuran dalam menghitung, melaporkan kewajiban pajaknya dalam SPT tahunan. Wajib pajak orang pribadi merupakan indikator yang besar dalam penerimaan pendapatan negara. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang luas kepada wajib pajak orang pribadi melaporkan pendapatana/ penghasilannya sesuai dengan ketentuan dan aturan pajak.

3. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemerintah terkait dengan wajib pajak orang pribadi dalam mengeluarkan aturan perpajakan yang berlandaskan moral. Pemerintah diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik, transparansi dan akuntabilitas agar wajib pajak orang pribadi mematuhi aturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Pemerintah memiliki peranan besar dalam membangkitkan motivasi dan memberikan pemahaman kepada wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi sehingga penerimaan pajak negara bisa dioptimalkan.

F. Sistematika Penulisan

Komposisi penulisan skripsi ini akan dibagi dalam 5 (lima) bab. Tiap-tiap bab akan dibagi dalam sub-sub bab. Tujuannya untuk mendapatkan gambaran sederhana tentang pokok-pokok pikiran yang terdapat pada tiap-tiap bab. Berikut ini dikemukakan pada garis-garis skripsi.

BAB I, merupakan bab pendahuluan yang dibagi dalam beberapa sub-sub yang berisi latar belakang, fokus penelitian dan deksripsi penelitian, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, tinjauan pustaka berisi tentang teori yang digunakan sebagai landasan yaitu Theory of Planned Behaviour, pajak penghasilan yang terdiri dari pengertian, fungsi pajak, pekerjaan bebas, ketentuan umum dan tata cara perpajakan, surat pemberitahuan, moralitas perpajakan, kepatuhan pajak, dan pemahaman pajak wajib pajak orang pribadi dan rerangka konseptual.

BAB III, merupakan bab yang berisi tentang metodologi penelitian yang meliputi jenis dan lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode

pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik pengolahan dan analisis data, dan pengujian keabsahan.

BAB IV, merupakan bab yang berisi tentang gambaran umum dan hasil penelitian.

BAB V, merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dan Implikasi penelitian.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Theory of Planned Behavior

Theory of planned behavior merupakan teori yang mendasari tentang niat dalam melakukan suatu perbuatan yang dikendalikan oleh kemauan dari dalam diri individu. *Theory of planned behavior* merupakan perluasan dari *theory of reasoned action* (Ajzen & Fishbein, 1980; Fishbein & Ajzen, 1975) dibuat diperlukan oleh model asli keterbatasan dalam berurusan dengan perilaku di mana orang tidak memiliki kendali penuh kehendak.

Niat dari dalam diri seseorang sebagaimana dalam hadist berikut,

إِنَّمَا عَمَالٌ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ نِيَالِدٍ يُصِيبُهَا وَامْرَأَةٍ أَيْنَكُحُّهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى هَاجَرِمَا إِلَيْهِ

Terjemahannya:

“Sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) sesuai dengan niatnya. Barangsiapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa yang hijrahnya karena urusan dunia yang ingin digapainya atau karena seorang wanita yang ingin dinikahnya, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkannya tersebut” (HR. al-Bukhāri dan Muslim)

Dari hadist diatas dapat dijelaskan bahwa segala niat yang baik akan diberikan jalan yang baik pula. Segala sesuatu yang dilakukan didasarkan niat yang baik karena Allah bukan karena keinginan yang lainnya. Dengan demikian apa yang kita kerjakan karena Allah akan diberikan sesuai dengan yang diniatkan. Niat yang baik akan membawa kebaikan, dan niat buruk akan membawa keburukan pula.

Niat atas perilaku dapat memberikan gambaran atas apa yang dilakukan seseorang, terkait dengan perilaku untuk melakukan tindakan atau tidak (Ajzen, 1991). Teori ini didasari oleh niat yang berasal dari dalam diri seseorang tindakan yang akan dilakukan. Ada tiga faktor penentu niat yang berdiri sendiri, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*, norma subjektif (*Subjective norm*), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control* (Hidayat, 2010:83).

1. Sikap terhadap perilaku.

Keyakinan-keyakinan perilaku (*behavioral beliefs*) yang kemudian menghasilkan sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*) adalah keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*), apakah perilaku tersebut positif atau negatif. Keyakinan atas segala sesuatu yang akan dilakukan itu berasal dari dalam diri individu masing-masing.

2. Norma Subjektif

Keyakinan normatif (*normative beliefs*) adalah keyakinan tentang harapan normatif orang lain yang memotivasi seseorang untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs and motivation to comply*). Keyakinan normatif merupakan indikator yang kemudian menghasilkan norma subjektif (*subjective norm*). Jadi norma subjektif adalah persepsi seseorang tentang pengaruh sosial dalam membentuk perilaku tertentu. Seseorang bisa terpengaruh atau tidak terpengaruh oleh tekanan sosial.

3. Kontrol perilaku yang dipersepsikan

Keyakinan kontrol (*control beliefs*) yang kemudian melahirkan kontrol perilaku yang dipersepsikan adalah keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Berdasarkan *Theory of planned behavior* dalam Ajzen (1991), dapat dijelaskan bahwa perilaku individu untuk tidak patuh, jujur dan memiliki kesadaran serta pemahaman terhadap ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat (*intention*). Niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu:

1. *behavioral belief*, yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku (*outcome belief*) dan evaluasi terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi terhadap hasil ini akan membentuk variabel sikap (*attitude*) terhadap perilaku itu. Wajib pajak memperhatikan dan mengawasi pemerintah dalam menjalankan amanah untuk mengelolah dana pajak. Wajib pajak akan membayar pajak ketika kinerja pemerintah bagus dalam hal ini ada output yang dihasilkan dan nampak dari apa yang mereka bayarkan.
2. *normative belief*, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya, seperti keluarga, teman, dan konsultan pajak, dan motivasi untuk mencapai harapan tersebut. Harapan normatif ini membentuk variabel norma subjektif (*subjective norm*) atas suatu perilaku. Pelayanan pemerintah memberikan kontribusi besar dalam optimalisasi penerimaan pajak. Wajib pajak yang dilayani dengan baik, dan mudah dalam memahami aturan pajak akan merasa nyaman dan mau membayar pajak.

Keluarga, teman, dan orang-orang disekelilingnya yang taat membayar pajak akan memberikan motivasi kepada wajib pajak lainnya untuk ikut andil dalam membayar pajak.

3. *control belief*, yaitu keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mempengaruhi perilakunya. *Control belief* membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) (Hidayat dan Argho). Pemerintah yang memegang amanah besar dari masyarakat atau wajib pajak untuk mengelolah dana yang mereka berikan sebagai dana negara harus menjaga kepercayaan dan berperilaku yang layak dimata wajib pajak.

Kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah sangat diperlukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak negara. Perilaku pemerintahan sekarang ini sudah cukup membuat wajib pajak kebingungan dengan maraknya berbagai kasus penggelapan uang negara yang mana dana tersebut dianggarkan untuk pembangunan negara demi kesejahteraan rakyat namun justru dinikmati sendiri oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Olehnya itu, keyakinan wajib pajak atas transparansi dan akuntabilitas pemerintah saat ini sudah mulai berkurang. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya perilaku atau sikap serta motivasi bagi wajib pajak untuk tidak membayar kewajibannya dan melakukan pelanggaran aturan perpajakan. Oleh karena itu kepercayaan kedua belah pihak sangat diperlukan.

Niat diasumsikan sebagai faktor motivasi yang mempengaruhi perilaku diantaranya bagaimana orang-orang bersedia untuk mencoba, berapa besar upaya, dan rencana untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu. Semakin besar keinginan untuk

mengerjakannya maka semakin besar pula kemungkinan untuk merealisasikannya. Pencapaian perilaku tergantung pada motivasi (niat) dan kemampuan baik secara materi maupun non materi. Wajib pajak yang memiliki niat dan kemampuan akan termotivasi untuk membayar kewajibannya.

B. Pajak Penghasilan

1. Pengertian

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memberikan definisi pajak: “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut pasal 4 ayat 1 undang-undang PPh no. 36 tahun 2008, yang dimaksud penghasilan yaitu setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Menurut Early Suandi dalam Iprianto (2013:90), penghasilan adalah penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan equitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan (*revenues*) dan keuntungan (*gains*). Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa (*fees*), bunga, deviden, royalty dan sewa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak atas penghasilan yang diterimanya.

Berdasarkan arah aliran tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

- a. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
- b. penghasilan dari usaha dan kegiatan;
- c. penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan
- d. penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

2. Fungsi pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi (Mardiasmo 2011 : 1), yaitu :

- a. Fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Pajak merupakan sumber dana untuk pembangunan negara dan membangun kesejahteraan masyarakat. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Dalam usaha peningkatan penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak di daerah-daerah melakukan program ekstensifikasi maupun intensifikasi.
- b. Fungsi mengatur (*regulerend*) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

3. *Pekerjaan Bebas (Independent Personal Service)*

Pekerjaan bebas (*Indipendent Personal Service*) adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terkait oleh suatu hubungan kerja (UU KUP, 2007). Dalam Undang-Undang Nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan dari Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu ayat (2):

Peredaran bruto merupakan peredaran bruto dari usaha, termasuk dari usaha cabang, selain peredaran bruto dari usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan.

Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas meliputi:

- a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
- b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
- c. Olahragawan;
- d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
- e. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
- f. agen iklan;
- g. pengawas atau pengelola proyek;
- h. perantara;
- i. petugas penjaja barang dagangan;
- j. agen asuransi; dan

- k. distributor perusahaan pemasaran berjenjang (*multilevel marketing*) atau penjualan langsung (*direct selling*) dan kegiatan sejenis lainnya.

Wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan memiliki NPWP kebanyakan masih belum melaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak yang mana dilihat dari tingkat pertumbuhan penduduk yang saat ini semakin meningkat namun peningkatan pajak yang penghasilan orang pribadi masih minim. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya agar wajib pajak mendapatkan kemudahan dalam mengakses dan memahami tentang perpajakan, namun hingga saat ini belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari anggaran APBN yang semakin meningkat namun penerimaan pendapatan negara dari pajak belum mampu menutupi anggaran secara optimal. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak khususnya wajib pajak pribadi bukan hanya berasal dari faktor individu akan tetapi juga dari faktor internal pemerintah pajak.

4. Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 ayat (2) wajib pajak adalah:

”orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan:

“setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Setiap wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif wajib memiliki NPWP. Undang-Undang nomor 28 Tahun 2007 Tentang ketentuan umum

dan Tata Cara perpajakan, pasal 1 ayat 6, Nomor Pokok Wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya.

Bagi Orang Pribadi yang memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja (sebagai karyawan) atau lebih dan/ atau penghasilan lainnya yang bukan dari usaha atau pekerjaan bebas, yang dipersiapkan:

- a. Bukti pemotongan PPh atas penghasilan dari pekerjaan (bukti potong PPh dari pemberi kerja);
- b. Rincian penghasilan lainnya selain yang berasal dari usaha dan/atau pekerjaan bebas (apabila ada);
- c. Bukti pembayaran, seperti pembayaran Zakat yang dibayar ke Badan Amil Zakat atau lembaga Amil Zakat atau pembayaran Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib ke lembaga yang disahkan oleh Kementerian Agama, atau pembayaran Fiskal Luar Negeri;
- d. Rincian harta dan kewajiban (hutang), misalnya untuk rumah dan tanah cukup melihat SPPT PBB-nya, untuk kendaraan lihat BPKB-nya, dan dokumen lainya yang menunjukkan kepemilikan harta;
- e. Data lainnya, seperti Daftar Susunan Keluarga.

5. Surat pemberitahuan

Surat Pemberitahuan merupakan sarana yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan sendiri pajak terutang yang dihitung sendiri berdasarkan aturan *self assesment system*. Menurut Mardiasmo (2003:23) Surat Pemberitahuan merupakan

bentuk kerjasama antara wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk meentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 pasal 1 surat pemberitahuan (SPT) adalah

“surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Dalam *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-103/PJ/2011* tentang petunjuk teknis tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disebut dengan SPT Tahunan adalah :

“Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang meliputi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT 1770, SPT 1770 S, SPT 1770 SS), SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT 1771 dan SPT 1771/S) termasuk SPT Tahunan Pembetulan.”

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan hasil perhitungan kewajiban pajaknya yang harus dibayarkan kepada negara

Surat pemberitahuan dibedakan dala 2 (dua) jenis:

- a. Surat pemberitahuan (SPT) Masa yaitu surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam masa pajak atau suatu saat.
- b. Surat pemberitahuan (SPT) Tahunan yaitu surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

Surat pemberitahuan (SPT) ini memiliki fungsi bagi wajib pajak penghasilan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 pasal 3 ayat 1 sebagai berikut:

- a. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak yang sebenarnya terutang.
- b. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan pajak atau pemungutan lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- c. Untuk melaporkan penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak.
- d. Untuk melaporkkan pembayaran dari pemotong atau pemungut pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu Masa pajak yang ditentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Mengisi SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. yang diisi terlebih dahulu adalah formulir lampiran, bukan induknya;
- b. di setiap lembar jangan lupa mengisi identitas seperti nama, NPWP dan tahun pajaknya;
- c. jangan lupa membubuhkan tanda tangan, karena jika tidak SPT yang anda laporkan dianggap tidak sah;
- d. sebelum SPT dikirim/ disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui tempat lain yang ditunjuk, jika SPT menunjukkan kurang bayar, kekurangan tersebut harus dibayar paling lambat sebelum SPT disampaikan ke KPP dan bukti pembayaran tersebut dilampirkan pada SPT tersebut;
- e. pembayaran dapat dilakukan di kantor pos

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) berdasarkan pasal 3 ayat 3 adalah:

1. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak.
2. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
3. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak penghasilan wajib pajak badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.

Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT pajak penghasilan paling lama dua bulan dengan cara menyampaikan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur berdasarkan peraturan Kementerian Keuangan. Namun, pemberitahuan ini harus disertai dengan perhitungan sementara pajak yang terutang dalam satu tahun pajak dan surat setoran pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang.

Nomor Pokok Wajib Pajak digunakan wajib pajak dalam pengisian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). SPT Tahunan PPh adalah formulir yang diisi Wajib Pajak untuk melaporkan identitas diri, harta, kewajiban/utang, penghasilan, dan penghitungan pajaknya setiap tahun.

C. Moralitas Perpajakan

Menurut Torgler & Schneider (2004) dalam Cahyonawati, moral perpajakan (*tax morale*) dapat didefinisikan sebagai motivasi intrinsik untuk mematuhi dan membayar pajak sehingga berkontribusi secara sukarela pada penyediaan barang-

barang publik. Moral perpajakan merupakan determinan kunci yang dapat menjelaskan mengapa orang jujur dalam masalah perpajakan.

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia yang menjadi dasar atas tingkah yang dilakukan untuk menyikapi keadaan yang ada. Kesadaran mendorong diri untuk melakukan tindakan yang dianggap mampu dan bisa dilakukan. Terkait dengan permasalahan perpajakan, wajib pajak orang pribadi mengikuti aturan perpajakan berdasarkan kesadaran akan keberadaan pajak yang merupakan suatu tanggung jawab kepada negara yang harus dipenuhi.

Aspek moral dalam perpajakan menyangkut dua hal yaitu (1) kewajiban moral dari wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara yang baik (2) menyangkut kesadaran moral wajib pajak atas alokasi penerimaan pajak oleh pemerintah (Thurman et.,al 1984; Truthman, 1993). Frey dan Feld (2002) berpendapat bahwa moral pajak didukung atau bahkan muncul ketika petugas pajak melayani pembayar pajak dengan hormat dan di sisi lain berkurang ketika pemerintah menganggap pembayar pajak sebagai individu yang harus *dipaksa* untuk membayar pajak: "Perasaan dikendalikan dengan cara yang negatif, dan dituduh kecurangan pajak, cenderung kerumunan keluar motivasi intrinsik untuk bertindak sebagai pembayar pajak dan terhormat, sebagai konsekuensi moral, pajak akan jatuh. Sebaliknya, jika petugas pajak membuat upaya untuk mengetahui alasan kesalahan oleh menghubungi wajib pajak dengan cara yang informal (misalnya dengan menelepon dia), wajib pajak akan menghargai perlakuan hormat dan semangat pajak akan ditegakkan".

Tidak hanya kepercayaan pemerintah tetapi juga kepercayaan terhadap pengadilan dan sistem hukum, dengan demikian hubungan antara negara dan

warganya mungkin memiliki efek pada pajak moral. Kepercayaan kepada pemerintah serta aturan hukum yang berlaku oleh wajib pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak. Biaya menjalankan pemerintahan dan peningkatan pajak lebih rendah jika wajib pajak lebih bersedia untuk membayar pajak mereka secara sukarela (Slemrod, 2003).

Irianto (2005) dalam Fikriningrum (2012:13) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak yaitu:

- a. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.
- b. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.
- c. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

D. Kepatuhan Pajak

Kepatuhan merupakan tingkat kesadaran seseorang akan peraturan yang ada. Faktor kesadaran yang merupakan motivasi intrinsik mendorong seseorang untuk

melakukan suatu tindakan. Kesadaran akan pentingnya untuk melakukan tindakan tersebut merupakan kepatuhan dan sebaliknya jika seseorang memiliki kesadaran akan sesuatu yang seharusnya dilakukan namun tidak dikerjakan sesuai dengan yang seharusnya berarti itu sudah tergolong pelanggaran atau tidak patuh.

Kepatuhan wajib pajak untuk membayar dan melaporkan kewajibannya merupakan hak wajib pajak. Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:112), menyatakan bahwa:

“Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.

Kepatuhan wajib pajak dapat dikategorikan dalam kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan materiil merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansi/ hakikat memenuhi ketentuan materiil perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Baik secara formal maupun materiil, wajib pajak memiliki hak untuk memenuhi kewajibannya oleh karena itu wajib pajak harus mematuhi aturan terkait dengan pajak, baik aturan mengenai pelaporan SPT secara jujur maupun dalam kepatuhan dan pembayaran tepat waktu sesuai dengan aturan yang ada. Tingkat kepatuhan wajib pajak pajak penghasilan menurut Direktorat Jenderal Pajak ditunjukkan oleh kepatuhan wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) pajak penghasilan. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan internal.

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu wajib pajak, dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor pendidikan, faktor kesadaran keberagaman, faktor kesadaran perpajakan, faktor pemahaman terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan dan faktor rasional. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar Wajib Pajak (Jotopurnomo dan Yenni, 2013).

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar PPh antara lain (Sulistiyono, 2013:8)

- a) pengetahuan menjadi hal terpenting dalam kepatuhan Wajib Pajak karena pengetahuan mencakup prosedur – prosedur perpajakan. Prosedur perpajakan merupakan langkah-langkah dalam melaksanakan pembayaran pajak. Pemerintah memberikan informasi mengenai prosedur perpajakan dengan melakukan penyuluhan.
- b) motivasi merupakan dorongan untuk menyelesaikan tanggungjawab sebagai Wajib Pajak yang akan menghasilkan manfaat yang baik bagi penerimaan negara. Dengan adanya dorongan dari berbagai pihak, tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan semakin tinggi. Salah satu hal yang mungkin menjadi penyebab adalah masih kurangnya kesadaran dan dorongan dari lingkungan yang mengajak untuk patuh pada peraturan perpajakan.
- c) Wajib Pajak menginginkan pelayanan yang baik dari pemerintah. Mulai dari pelayanan yang berkaitan dengan pembayaran pajak, pelayanan di kantor pajak dan pelayanan sebagai imbalan Wajib Pajak yang telah membayar pajak. Imbalan

Wajib Pajak yang telah dibayar pajak merupakan pelayanan yang sangat diinginkan masyarakat,

- d) pemerintah melakukan pemeriksaan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan pemeriksaan ini pemerintah akan mengetahui benar atau tidak jumlah pajak yang dibayarkan Wajib Pajak,
- e) maraknya kasus korupsi di Indonesia saat ini sangat mempengaruhi masyarakat dalam melaksanakan tugasnya. Banyak masyarakat yang sudah tidak percaya dengan pemerintah karena kasus korupsi yang banyak dilakukan oleh beberapa pihak. Adanya kasus ini membuat masyarakat enggan membayar pajak dan akan merugikan negara,
- f) peranan hukum merupakan sanksi perpajakan yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak dapat melaksanakan peraturan yang berlaku.

Kriteria wajib pajak patuh sesuai dengan UU 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 192/ PMK.03/2007 adalah sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan untuk semua jenis pajak.
2. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

E. Pemahaman Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi

Pemahaman merupakan hasil olah pikiran yang memberikan suatu gambaran terkait dengan tindakan yang akan dilaksanakan. Pemahaman sangat memiliki peranan penting dalam mengambil suatu kesimpulan. Wajib pajak memerlukan pemahaman terkait dengan perpajakan sehingga dapat memudahkan dalam membayar dan menghitung pajaknya serta melaporkannya pada Direktorat Jenderal Perpajakan. Pemahaman yang tinggi akan memberikan nilai tersendiri bagi setiap individu. Tingkat pemahaman seseorang berbeda-beda, olehnya itu pemerintah selaku otoritas pajak mengemban tanggung jawab untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Resmi (2009, dalam Masrurroh, 2013:23) mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT.

Ekawati (2008) dalam Masrusoh 2013:5) berpendapat bahwa kesadaran dan kedisiplinan dari masyarakat sangat diperlukan untuk memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan. Semua ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh wajib pajak apabila wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keempat hal berikut:

- a. Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar, sehingga wajib pajak harus memiliki pemahaman yang cukup mengenai pengisian SPT.
- b. Penghitungan pajak sesuai dengan pajak terutang yang ditanggung oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak harus memiliki pemahaman yang cukup dalam menghitung pajak terutang yang ditanggung oleh wajib pajak.
- c. Penyetoran pajak (pembayaran) secara tepat waktu sesuai yang ditentukan, sehingga wajib pajak harus mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penyetoran pajak.
- d. Pelaporan atas pajaknya ke kantor pajak setempat oleh wajib pajak.

Banyak hal terkait dengan perpajakan yang harus dipahami oleh wajib pajak terutama wajib pajak orang pribadi. Pengisian SPT, Tarif Pajak, Penghasilan Kena Pajak, Penghasilan Tidak Kena Pajak dan lain sebagainya yang terkait dengan pajak. Pemahaman pajak juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi optimalisasi penerimaan pajak. Wajib pajak yang memahami aturan perpajakan akan membayar pajak sesuai dengan ketentuan dan aturan dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki pemahaman yang kurang tentang pajak.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah sistem self assessment yang merupakan sistem yang mempercayakan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang. Sistem ini tentu membutuhkan kerja sama dengan wajib pajak dan diperlukan berbagai macam peraturan yang digunakan sebagai alat kontrol serta pengawasan, disamping itu dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan ini juga berpengaruh terhadap sukses atau tidaknya penerapan sistem pemungutan self assesement ini. Menurut hasil penelitian Ardianto (2012) menyatakan pemahaman self assessment sistem berpengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, begitu juga dengan hasil penelitian Syahril (2013) yang menyatakan tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Masrurroh, 2013:23).

Resmi (2009 dalam Musroroh 2013: 23) mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT.

Pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak baik jumlah yang harus dibayarkan maupun aturan-aturan tentang pajak sangat memerlukan pemahaman. wajib pajak yang kurang memahami tentang pajak akan kesulitan dan tidak mampu menghitung sendiri kewajiban yang harus dibayarkan. Meskipun pelayanan pajak dapat membantu akan tetapi wajib pajak seharusnya memiliki pemahaman yang luas. Pelaporan penghasilan baik tetap maupun tidak tetap harus dilaporkan berdasarkan aturan yang berlaku. Pemahaman dan kesadaran wajib pajak yang tinggi dapat meningkatkan penerimaan negara yang digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

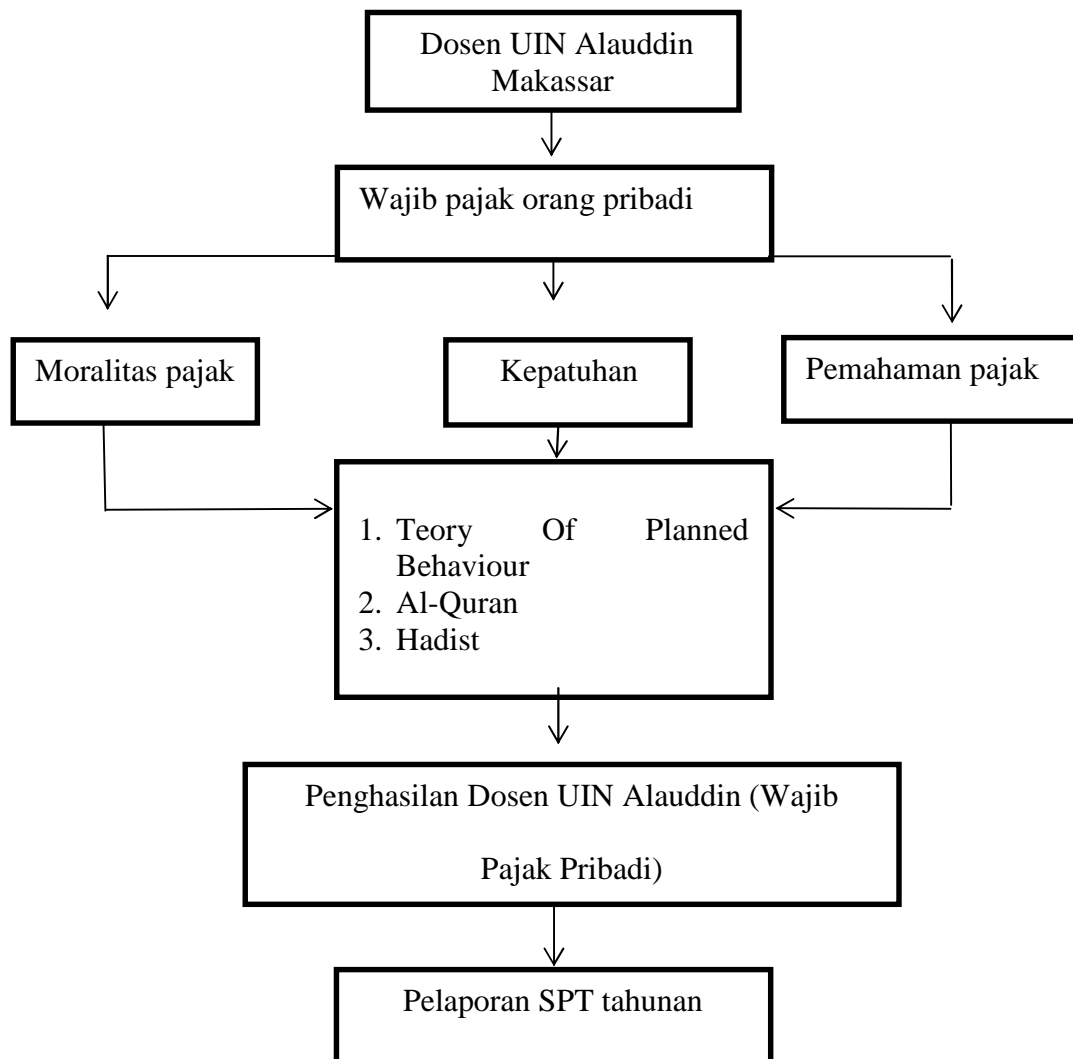
F. Rerangka Konseptual

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara yang mampu menopang perekonomian negara. Pajak penghasilan memberikan kontribusi besar dalam pendapatan negara. Pajak penghasilan yang berasal dari wajib pajak pribadi dapat ditingkatkan melalui pemungutan pajak atas penghasilan dari pekerjaan bebas.

Penelitian ini menggunakan dosen UIN Alauddin Makassar sebagai wajib pajak pribadi. Wajib pajak pribadi akan diteliti melalui tiga aspek diantaranya aspek moralitas, kepatuhan dan pemahaman dan *theory of planned behaviour* digunakan sebagai alat analisis.

Moral pajak merupakan kesadaran dari dalam diri individu yang memotivasi untuk membayar pajak. Kesadaran wajib pajak yang tinggi akan meningkatkan kemauan untuk membayar pajak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh. Disamping kesadaran, pemahaman dosen selaku wajib pajak dapat memotivasi untuk membayar pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang luas tentang pajak akan membayar pajak penghasilan dengan mudah, dibandingkan dengan wajib pajak yang kurang pemahaman. Dengan adanya kesadaran dan pemahaman tentang pajak maka akan mendorong wajib pajak untuk patuh terhadap aturan perpajakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *theory of planned behaviour* untuk menganalisis sejauh mana aspek ini yang dimiliki dosen dalam melaporkan penghasilan dalam surat pemberitahuan pajak.

Berdasarkan latar belakang penelitian, permasalahan, tujuan serta tinjauan pustaka, maka dapat digambarkan suatu kerangka konseptual dari penelitian sebagai berikut:



(Gambar 2.2)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kualitatif. Paradigma kualitatif merupakan paradigma penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci (Indriantoro dan Bambang, 2013:12).

Menurut Basrowi dan Suwandi (2008:1-2) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Sedangkan Bogdan dan Taylor (1992) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari (Basrowi (2008:21–22).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Hal ini dikarenakan wajib pajak orang pribadi memiliki ruang lingkup yang cukup besar. Disamping itu, kebanyakan dosen selaku wajib pajak memiliki pekerjaan diluar dari pekerjaan utamanya sebagai dosen.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yang mana penelitian dilakukan terhadap fenomena tertentu yang diperoleh peneliti dari subyek peneliti berupa individu. Penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi (Indrianto dan Bambang, 2013:26). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat moralitas, kepatuhan dan pemahaman wajib pajak orang pribadi dalam SPT tahunan terkait dengan penghasilan.

C. Sumber Data

Sumber data penelitian ini yaitu data primer (*primary data*). Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui perantara (Indrianto dan Bambang, 2013:146). Sumber data primer penelitian ini adalah dari dosen Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam penelitian kualitatif, sampel sumber data dipilih secara *purposive* dan *snowball sampling*. Penentuan sampel sumber data masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian lapangan. Sampel sumber data pada tahap awal memasuki lapangan di pilih orang yang memiliki power dan otoritas pada situasi sosial atau obyek yang diteliti sehingga mampu “membuka pintu” kemana saja peneliti akan melakukan pengumpulan data. Siapa yang dijadikan sumber data dan berapa jumlahnya dapat diketahui setelah penelitian selesai. Jadi tidak dapat disiapkan sejak awal atau dalam proposal (Sugiyono, 2013:382).

Sampel sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sepuluh informan. Informan tersebut yang digunakan harus berprofesi sebagai dosen.

Dalam penelitian kualitatif informan sumber data tidak ditentukan dan hanya bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian dilakukan. Jika selama penelitian data yang diperoleh masih kurang maka sampel sumber data masih perlu dikembangkan.

Berikut ini merupakan informan yang memberikan informasi dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan 8(delapan) informan dan 1 (Satu) orang sebagai triangulasi. Peneliti menggunakan nama samaran untuk menjaga kerahasiaan identitas informan dengan alasan bahwa penelitian ini bersifat sensitif.

Tabel. 1.1
Data Informan

NO.	NAMA INFORMAN	STATUS	FAKULTAS/ KANTOR
1.	Bapak Kurniawan	Dosen	Syari'ah Dan Hukum
2.	Ibu Megawati Pratiwi	Dosen	Tarbiah Dan Keguruan
3.	Bapak Adam Yahya	Dosen	Ushuluddin Dan Filsafat
4.	Bapak Muh.Amrh Rikardo	Dosen	Adab Dan Humaniora
5.	Ibu Sulistianingsih	Dosen	Dakwah Dan Komunikasi
6.	Bapak Firdaus	Dosen	Sains Dan Teknologi
7.	Zulkifli Amir	Dosen	Ilmu Kesehatan
8.	Bapak Muh. Ayub Pratama	Dosen	Ekonomi Dan Bisnis Islam
9.	Bapak Ismail	Account Recent	PAJAK

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses yang penting dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2012:224) teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode survei dan metode observasi. Kedua metode ini merupakan metode pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara (Interview). Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan lisan kepada subyek penelitian. Teknik ini digunakan dengan alasan penelitian yang dilakukan bersifat kompleks dan sensitif sehingga dengan menggunakan teknik lain akan kurang tanggap.

Menurut Sugiyono (2012:186), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Hasil wawancara akan dicatat dan dijadikan sebagai bahan penelitian. Teknik wawancara akan dilakukan dengan cara tatap muka (*face to face*). Teknik ini mempunyai kelebihan dibandingkan dengan wawancara melalui telepon dan teknik kuesioner. Teknik ini memungkinkan untuk mengajukan banyak pertanyaan dan memerlukan waktu lebih lama dibandingkan dengan wawancara melalui telepon. Disamping itu, wawancara secara tatap muka dianggap lebih sopan dibandingkan dengan wawancara melalui telepon.

Metode survei juga digunakan dalam penelitian ini. Metode ini digunakan dengan maksud mengetahui respon subyek yang diteliti mengenai permasalahan yang ada. Kelebihan dari metode observasi dibandingkan dengan metode survei bahwa data yang dikumpulkan umumnya tidak terdistorsi, lebih akurat dan bebas dari respon bias (Indrianto dan Bambang, 2013:157). Observasi dilakukan secara langsung oleh peneliti (*direct observation*). Observasi ini digunakan dengan tujuan untuk mengetahui perilaku subyek pada saat observasi berlangsung. Data yang diperoleh dari observasi langsung akan digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara.

Teknik pengumpulan data dengan dokumen juga digunakan yang mana dokumen yang digunakan peraturan dan kebijakan. Hal ini agar penelitian dapat dipercaya dan sebagai pelengkap dari metode wawancara dan observasi.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti sebagai *human instrument* berfungsi untuk menentukan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data melalui kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan dan temuan. Setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara (Sugiyono, 2009; 222).

F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Analisis data menurut Patton (1980) dalam Basrowi (2008:268) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Menurut Milles dan Huberman (1992), analisis data pada penelitian kualitatif meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh di lokasi penelitian kemudian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Laporan atau data di lapangan dituangkan dalam uraian lengkap dan terperinci. Dalam reduksi data peneliti dapat menyederhanakan data dalam bentuk ringkasan.

Dalam penelitian ini, reduksi data yang dilakukan peneliti yaitu memilah-milah data hasil wawancara, dan dokumentasi mana yang penting untuk digunakan dan mana yang tidak perlu digunakan sesuai dengan fokus penelitian sebelumnya yaitu moralitas perpajakan, kepatuhan dan pemahaman wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, peneliti melakukan reduksi data dari informasi yang telah didapat kemudian dirangkum dan difokuskan pada hal-hal yang penting untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk teks atau uraian singkat yang merupakan hasil wawancara.

3. Penarikan kesimpulan

Peneliti berusaha untuk menganalisa dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif. Data yang telah terkumpul akan diklasifikasikan dan diketahui gejalanya kemudian dihubungkan dengan teori yang ada dan dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang moralitas perpajakan, kepatuhan dan pemahaman wajib pajak orang pribadi atas pelaporan SPT tahunan terkait dengan penghasilannya.

G. Pengujian Keabsahan

Pada dasarnya dalam penelitian kualitatif belum ada teknik yang baku dalam menganalisa data, sehingga ketajaman melihat data oleh peneliti serta kekayaan pengalaman dan pengetahuan harus dimiliki oleh peneliti. Menurut Moleong (2009:324), untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Ada empat kriteria yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Teknik Memeriksa Kredibilitas Data (Derajat Kepercayaan)

a. Triangulasi

Triangulasi, yaitu dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data itu. Paling banyak pemeriksaan melalui sumber lainnya, misalnya antara: sumber, metode, penyidik, dan teori (Denzin, 1978 dalam Melong, 2009:324). Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dengan sumber lain melalui berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu yang berlainan dan dengan metode yang berlainan.

Triangulasi terdiri atas: (sugiyono, 2009: 274)

1) Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diambil dari beberapa sumber tidak bisa dirata-ratakan seperti penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda dan mana yang spesifik dari sumber tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan sumber data tersebut.

2) Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan

data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3) Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi teknik yang mana penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda. Peneliti akan menggunakan teknik wawancara mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan selama wawancara kemudian dicek dengan observasi. Pertanyaan akan diajukan kepada wajib pajak orang pribadi dalam hal ini dosen yang memiliki tingkat penghasilan yang berbeda-beda. Setelah melakukan penelitian, peneliti melakukan konfirmasi kepada pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengelola pajak UIN Alauddin Makassar untuk melakukan konfirmasi sebagai pembanding dari hasil penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *theory of planned behaviour*.

b. Kecukupan referensial

Kecukupan referensial adalah mengumpulkan berbagai bahan-bahan, catatan-catatan, atau rekaman-rekaman yang dapat digunakan sebagai referensi dan patokan

untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data yang dikumpulkan pada saat wawancara.

2. Keteralihan Data (*transferability*)

Teknik memeriksa keteralihan data akan dilakukan dengan teknik “uraian rinci”, yaitu dengan melaporkan hasil penelitian seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Derajat keteralihan dapat dicapai lewat uraian yang cermat, rinci, tebal, atau mendalam serta adanya kesamaan konteks antara pengirim dan penerima. Upaya untuk memenuhi hal tersebut, peneliti melakukannya dengan tabulasi data serta disajikan dalam hasil dan pembahasan.

3. Kebergantungan (*dependability*)

Dalam penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit secara keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh auditor yang independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai membuat kesimpulan harus dapat ditunjukkan oleh peneliti.

4. Kepastian Data (*confirmability*)

Dalam penelitian kualitatif uji kepastian data mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji kepastian (*confirmability*) berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Kepastian yang dimaksud berasal dari konsep

objektivitas, sehingga dengan disepakati hasil penelitian tidak lagi subjektif tapi sudah objektif.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum UIN Alauddin Alauddin Makassar

1. Sejarah perkembangan UIN Alauddin Makassar

Sejarah perkembangan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang dulu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Makassar melalui beberapa fase yaitu:

a. Fase tahun 1962 s.d 1965

Pada mulanya IAIN Alauddin Makassar yang kini menjadi UIN Alauddin Makassar berstatus Fakultas Cabang dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas desakan Rakyat dan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan serta atas persetujuan Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Nomor 75 tanggal 17 Oktober 1962 tentang penegerian Fakultas Syari'ah UMI menjadi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Cabang Makassar pada tanggal 10 Nopember 1962. Kemudian menyusul penegerian Fakultas Tarbiyah UMI menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Cabang Makassar pada tanggal 11 Nopember 1964 dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 91 tanggal 7 Nopember 1964. Kemudian Menyusul pendirian Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta cabang Makassar tanggal 28 Oktober 1965 dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 77 tanggal 28 Oktober 1965.

b. Fase tahun 1965 s.d 2005

Dengan mempertimbangkan dukungan dan hasrat yang besar dari rakyat dan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan terhadap pendidikan dan pengajaran agama

Islam tingkat Universitas, serta landasan hukum Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 1963 yang antara lain menyatakan bahwa dengan sekurang-kurangnya tiga jenis fakultas IAIN dapat digabung menjadi satu institut tersendiri sedang tiga fakultas dimaksud telah ada di Makassar, yakni Fakultas Syari'ah, Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin, maka mulai tanggal 10 Nopember 1965 berstatus mandiri dengan nama Institut Agama Islam Negeri Al-Jami'ah al-Islamiyah al-Hukumiyah di Makassar dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 79 tanggal 28 Oktober 1965.

Penamaan IAIN di Makassar dengan Alauddin diambil dari nama raja Kerajaan Gowa yang pertama memeluk Islam dan memiliki latar belakang sejarah pengembangan Islam di masa silam, di samping mengandung harapan peningkatan kejayaan Islam di masa mendatang di Sulawesi Selatan pada khususnya dan Indonesia bahagian Timur pada umumnya. Sultan Alauddin adalah raja Gowa XIV tahun 1593-1639, (kakek/ datok) dari Sultan Hasanuddin Raja Gowa XVI, dengan nama lengkap I Mangnga'rangi Daeng Manrabbia Sultan Alauddin, yang setelah wafatnya digelar juga dengan Tumenanga ri Gaukanna (yang mangkat dalam kebesaran kekuasaannya), demikian menurut satu versi, dan menurut versi lainnya gelar setelah wafatnya itu adalah Tumenanga ri Agamana (yang wafat dalam agamanya). Gelar Sultan Alauddin diberikan kepada Raja Gowa XIV ini, karena dialah Raja Gowa yang pertama kali menerima agama Islam sebagai agama kerajaan. Ide pemberian nama Alauddin kepada IAIN yang berpusat di Makassar tersebut, mula pertama dicetuskan oleh para pendiri IAIN Alauddin, di antaranya adalah Andi Pangeran Daeng Rani, (cucu/turunan) Sultan Alauddin, yang juga mantan Gubernur Sulawesi Selatan, dan Ahmad Makkarausu Amansyah Daeng Ilau, ahli sejarah Makassar.

Pada Fase ini, IAIN (kini UIN) Alauddin yang semula hanya memiliki tiga (3) buah Fakultas, berkembang menjadi lima (5) buah Fakultas ditandai dengan berdirinya Fakultas Adab berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 148 Tahun 1967 Tanggal 23 Nopember 1967, disusul Fakultas Dakwah dengan Keputusan Menteri Agama RI No.253 Tahun 1971 dimana Fakultas ini berkedudukan di Bulukumba (153 km arah selatan kota Makassar), yang selanjutnya dengan Keputusan Presiden RI No.9 Tahun 1987 Fakultas Dakwah dialihkan ke Makassar, kemudian disusul pendirian Program Pascasarjana (PPs) dengan Keputusan Dirjen Binbaga Islam Dep. Agama No. 31/E/1990 tanggal 7 Juni 1990 berstatus kelas jauh dari PPs IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang kemudian dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 403 Tahun 1993 PPs IAIN Alauddin Makassar menjadi PPs yang mandiri.

c. Fase Tahun 2005 s.d sekarang

Untuk merespon tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan mendasar atas lahirnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.2 tahun 1989 di mana jenjang pendidikan pada Departemen Pendidikan Nasional R.I dan Departemen Agama R.I, telah disamakan kedudukannya khususnya jenjang pendidikan menengah, serta untuk menampung lulusan jenjang pendidikan menengah di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional R.I dan Departemen Agama R.I, diperlukan perubahan status Kelembagaan dari Institut menjadi Universitas, maka atas prakarsa pimpinan IAIN Alauddin periode 2002-2006 dan atas dukungan civitas Akademika dan Senat IAIN Alauddin serta Gubernur Sulawesi Selatan, maka diusulkanlah konversi IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar kepada Presiden R.I melalui Menteri Agama R.I dan Menteri Pendidikan Nasional

R.I. Mulai 10 Oktober 2005. Status Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Makassar berubah menjadi (UIN) Universitas Islam Negeri Alauddinn Alauddin Makassar berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia No 57 tahun 2005 tanggal 10 Oktober 2005 yang ditandai dengan peresmian penandatanganan prasasti oleh Presiden RI Bapak DR H Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 4 Desember 2005 di Makassar.

Dalam perubahan status kelembagaan dari Institut ke Universitas, UIN Alauddin Makasar mengalami perkembangan dari lima (5) buah Fakutas menjadi 7 (tujuh) buah Fakultas dan 1 (satu) buah Program Pascasarjana (PPs) dan kemudian dibentuk 1 Fakultas pada tahun 2012 yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam:

1. Fakuktas Syari'ah dan Hukum
2. Fakuktas Tarbiyah dan Keguruan
3. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
4. Fakultas Adab dan Humaniora
5. Fakultas Dakwah dan Komunikasi
6. Fakultas Sains dan Teknologi
7. Fakultas Ilmu Kesehatan.
8. Program Pascasarjana (PPs)
9. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

2. Visi dan Misi UIN

Visi:

Pusat pencerahan dan transformasi ipteks berbasis peradaban Islam.

Misi UIN:

- a. Menciptakan atmosfir akademik yang representative bagi peningkatan mutu Perguruan Tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat.
- b. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemampuan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Ipteks).
- c. Mewujudkan universitas yang mandiri, berkarakter, bertatakelola baik, dan berdaya saing menuju universal riset dengan mengembangkan nilai spiritual dan tradisi keilmuan.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan produk intelektual yang bermanfaat dan terbangunnya potensi insan yang kuat dengan pertimbangan kearifan lokal.
- b. Terwujudnya kampus sebagai pusat pendidikan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis integrasi keilmuan.
- c. Terciptanya sistim manajemen, kepemimpinan, dan kelembagaan yang sehat serta terwujudnya tata ruang, lingkungan, dan iklim kampus yang islami.
- d. Terwujudnya jejaring kerjasama dengan lembaga lokal, nasional, dan internasional.

4. Motto

3P : Pencerdasan, Pencerahan, Prestasi (*Intelligence, Enlightenment, Achievement*)

5. Pola Ilmiah Pokok

Pola ilmiah pokok Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar adalah kajian Qur'an Hadits, perdamaian dan peradaban

6. *Filosofi Pendidikan*

- a. Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa telah dilengkapi dengan berbagai potensi dan kemampuan. Potensi dan kemampuan itu pada hakekatnya adalah karunia Allah kepada manusia yang semestinya dimanfaatkan dan dikembangkan, serta tidak boleh disia-siakan. Pendidikan dan pengajaran pada umumnya berfungsi untuk mengembangkan potensi dan kemampuan sesuai dengan sifat, karakteristik, tingkat dan jenisnya yang berbeda-beda agar menjadi aktual dan kehidupan sehingga berguna bagi orang yang bersangkutan, masyarakat dan bangsanya serta menjadi bekal untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan demikian usaha untuk mengefektifkan mengarah potensi dan kemampuan tersebut merupakan konsekuensi dari amanah Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Dalam pembangunan nasional, manusia memiliki peranan yang strategis yakni sebagai subjek pembangunan. Untuk dapat memainkan perannya sebagai subjek pembangunan, manusia Indonesia perlu dikembangkan menjadi manusia yang utuh paripurna melalui upaya pendidikan yang berkelanjutan yang dilaksanakan secara terus menerus sampai kepada jenjang pendidikan tinggi sehingga dengan demikian manusia Indonesia mampu memerkarkan potensinya seoptimal mungkin untuk menjadi sumber daya pembangunan yang berkualitas andal dan profesional.
- c. Pendidikan nasional di selenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pemerintah berusaha memberikan kesempatan yang sama (*equal Opportunity*) dan seluas-luasnya

kepada semua warga negara untuk mendapatkan dan menikmati pendidikan dalam kerangka mewujudkan salah satu tujuan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan Nasional yang berkesinambungan pada akhirnya akan dibatasi oleh kondisi obyektif peserta didik itu sendiri, kesiapan dan kemauannya untuk berkembang dan mencapai keunggulan pendidikan. Oleh karena itu, di perlukan upaya tidak hanya memberikan kesempatan yang sama, tetapi juga memberikan perlakuan yang sesuai dengan kondisi obyektif peserta didik sehingga tujuan pendidikan terwujud yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

B. Pelaporan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Aspek Moral, Pemahaman Dan Kepatuhan

1. Pelaporan dan pembayaran pajak penghasilan ditinjau dari moral wajib pajak

Kesadaran merupakan suatu faktor terbesar mengapa seseorang mau mengerjakan sesuatu. Kesadaran yang disertai dengan niat yang baik akan memberikan motivasi yang tinggi untuk mengerjakannya. Wajib pajak yang memiliki kesadaran bahwa pajak adalah kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara akan membayar pajak sesuai dengan penghasilannya dan melaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT).

Wajib pajak yang menyadari tentang pentingnya pajak bagi negara, diharapkan mampu meningkatkan kewajiban moral yang dimiliki sehingga dapat mematuhi aturan perpajakan dan mau membayar pajak sesuai dengan penghasilannya.

Pemahaman mengenai pajak, akan menumbuhkan kesadaran dari dalam diri untuk ikut serta dalam melaksanakan dan menjalankan tanggung jawab sebagai warga negara.

Tingkat kesadaran, sikap dan perilaku yang dimiliki setiap individu berbeda-beda. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dipengaruhi oleh keinginan, kesadaran dan niat yang merupakan unsur dari dalam diri untuk mengerjakannya. Wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi bahwa pajak itu harus dibayarkan karena itu merupakan kewajiban kepada negara. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dan semua informan memiliki jawaban yang sama yang mengatakan pajak merupakan suatu kewajiban dan karena kewajiban itu kita harus membayar pajak.

Bapak Adam Yahya selaku informan mengatakan bahwa :

Pajak itu kan suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh si wajib pajak. Kalau saya karena itu adalah suatu kewajiban maka saya akan membayar pajak meskipun tidak ada sanksi dan denda. Tanpa denda ataupun sanksi saya tetap membayar pajak, apalagi status saya sebagai PNS otomatis pajaknya dipungut secara langsung.

Bapak Muh. Ayub Pratama juga mengatakan bahwa

Pajak itu merupakan kewajiban kita. Sebagai ummat muslim sepatutnya kita menyadari akan kewajiban-kewajiban itu. Meskipun pada kenyataannya banyak pelaku yang menyalahgunakan pajak akan tetapi tidak seharusnya mempengaruhi keinginan kita untuk membayar pajak. Permasalahan penggelapan akan mereka tanggung sendiri.

Dari hasil pernyataan diatas dapat kita lihat bahwa wajib pajak memiliki kesadaran dari dalam diri mereka sehingga menanggap pajak sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan. Kesadaran tersebut mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Kesadaran yang tinggi akan menimbulkan niat untuk membayar pajak. Hal ini sejalan dengan pendapat Ajzen 1991 yang mengatakan bahwa niat atas perilaku dapat memberikan gambaran apa yang dilakukan seseorang apakah mau melakukan atau

diungkapkan oleh Bapak Zulkifli Amir yang merupakan salah satu informan mengatakan bahwa

selama memang pajak itu digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan dirasakan oleh masyarakat saya kira itu sah-sah saja.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa kemauan yang timbul dari kesadaran untuk membayar pajak oleh Bapak Zulkifli Amir dalam *theory of planned behaviour* dikatakan bahwa niat untuk melakukan sesuatu dipengaruhi oleh 3 faktor. Niat yang dimiliki oleh Bapak Zulkifli Amir untuk membayar pajak termasuk dalam *control belief* yang meyakini bahwa pajak yang dibayarkan digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Dengan memandang pajak sebagai sesuatu yang memiliki peranan besar sehingga Bapak Zulkifli Amir membayar pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Irianto (2005) dalam Rantum dan Priyono (2009) yang mengatakan bahwa kesadaran untuk membayar pajak didorong oleh kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dan menunjang pembangunan negara. Kesadaran tersebut mendorong wajib pajak untuk mau membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Wajib pajak yang memiliki kesadaran moral yang tinggi sebagai warga negara yang baik dalam melaksanakan kewajibannya berbeda dengan wajib pajak yang tidak mempunyai kesadaran moral. Wajib pajak menyadari bahwa patuh terhadap aturan akan memberikan manfaat dibanding membangkang terhadap aturan. Informan atas nama Ibu sulistianingsih mengatakan bahwa

Sebagai warga negara yang baik saya tetap membayar pajak. Terlepas dari adanya oknum-oknum yang melakukan pelanggaran-pelanggaran saya tetap membayar pajak. Kita positif-positif sajalah, yang penting kita sudah membayar kewajiban kita. Apalagi kita tahu bahwa pajak itu untuk pembangunan negara.

Pernyataan Ibu tersebut memberikan gambaran bahwa wajib pajak memiliki kesadaran terhadap pembayaran pajak. Wajib pajak menyadari bahwa pajak dibutuhkan oleh negara untuk pembangunan dan akan dinikmati kembali oleh wajib pajak dan semua masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Thurman 1984 dan Troutman 1993 yang mengatakan bahwa aspek moral wajib pajak salah satunya adalah kesadaran moral terkait dengan alokasi dan distribusi dari penerimaan pajak. Wajib pajak yang menyadari hasil bahwa apa yang mereka bayarkan kepada negara akan kembali dan dimanfaatkan bersama. Moral wajib pajak yang tinggi dapat meningkatkan penerimaan pajak negara.

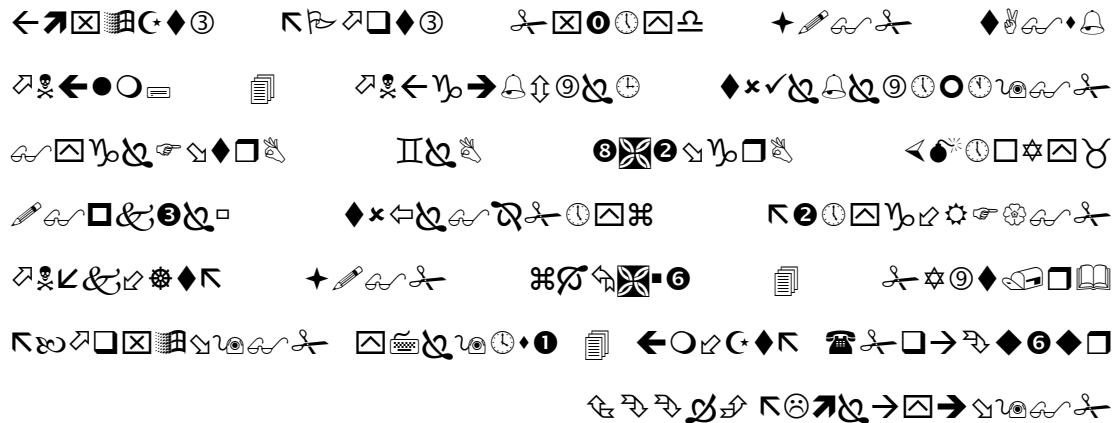
Kesadaran mengenai keberadaan pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak memberikan motivasi untuk menjalankan kewajiban. Pembayaran pajak yang merupakan hak wajib pajak diberikan kewenangan untuk membayar pajak. Keadaan dilapangan akan membentuk kesadaran tersendiri bagi setiap individu dalam menjalankan aktivitasnya. Meskipun pada kenyataannya bahwa pajak masih kurang dalam transparansi penggunaan dananya akan tetapi masyarakat tetap harus memenuhi kewajibannya. Pajak yang diharapkan mampu menopang perekonomian negara dan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat namun hingga saat ini masih jauh dari titik optimal. Masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian rendah masih dikenakan pajak baik secara langsung maupun tidak langsung. Dana pajak yang diharapkan mampu mensejahterakan rakyat hingga saat ini masih jauh dari yang diharapkan. Pajak yang digunakan untuk membangun fasilitas negara seperti sekolah-sekolah dan jalanan yang paling umum kita lihat masih minim. Terutama di daerah pedesaan, fasilitas yang digunakan masih sangat rendah

kualitasnya. Jalanan, jembatan bahkan sekolah-sekolah yang digunakan dibuat sendiri oleh masyarakat sekitar dan tenaga pengajar pun masih sukarelawan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa pajak merupakan suatu kontribusi masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa. Undang-undang memaksakan pembayaran pajak dengan tujuan mengoptimalkan pembayaran pajak. Bapak Zulkifli Amir mengatakan bahwa pajak itu dikatakan memaksa karena ada aturan-aturan yang mengikat. Adanya sanksi dan denda membuat wajib pajak tidak mampu menghindari pajak secara keseluruhan. Meskipun wajib pajak pribadi membayar pajak akan tetapi tidak semua penghasilan yang diterima dilaporkan dan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wajib pajak pada umumnya masih melakukan pembayaran pajak terutama pegawai negeri sipil yang secara otomatis penghasilannya langsung dipotong pajak akan tetapi penghasilan lainnya yang belum dilaporkan.

Berdasarkan undang-undang nomor 46 tentang penghasilan diluar dari peredaran bruto tertentu tetap dikenakan pajak. Penghasilan diluar dari pekerjaan utama inilah yang masih kurang dipahami oleh wajib pajak sehingga tidak melaporkannya dalam SPT tahunan. Pelaporan penghasilan inilah yang memerlukan kesadaran dan kejujuran wajib pajak pribadi yang tinggi. Penghasilan yang dikenakan pajak sesuai dengan tarif pajak yang berlaku memerlukan kesadaran dan kejujuran wajib pajak. Kesadaran dan kejujuran ini merupakan moral dari dalam diri individu masing-masing. Jujur merupakan suatu sikap yang termasuk golongan al-Akhlu al-Karimah (akhlak yang terpuji) yang selalu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah swt memerintahkan orang-orang yang beriman untuk selalu berlaku

jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu membawa keselamatan. Kejujuran bisa berupa perkataan, bisa juga perbuatan. Dalam surat Al-Imran ayat 15 Allah SWT berfirman:



Terjemahan:

Allah berfirman: "Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. bagi mereka surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya; Allah ridha terhadapNya. Itulah keberuntungan yang paling besar".

Kejujuran wajib pajak pribadi dalam melaporkan pajak dalam SPT tahunan yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk memungut pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan negara. Penghasilan baik yang bersifat final maupun tidak tetap dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pajak diluar dari pajak final yang berasal dari pekerjaan bebas tetap dikalkulasikan dalam SPT tahunan sehingga hal ini membutuhkan kesadaran dan kejujuran yang tinggi.

Kesadaran masyarakat untuk melaporkan penghasilan kena pajaknya sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Bapak Kurniawan salah satu informan mengatakan bahwa

Itu juga harus dipahami bahwa setiap orang mempunyai penghasilan yang diperoleh dari negara maupun dari luar sehingga kita harus punya kemauan untuk melaporkan dan membayar pajak. Seharusnya ada kesadaran sendiri untuk mau membayar pajak.

Pelaporan dan pembayaran pajak penghasilan baik dari pekerjaan utama maupun pekerjaan bebas harus dilandasi kesadaran dan niat untuk menjalankan kewajiban. Sebagai ummat Islam kita seharusnya lebih memahami kewajiban kita. Niat untuk membayar pajak dengan tujuan karena Allah dan untuk kemaslahatan rakyat itu akan memberikan nilai positif. Seperti dalam HR. al-Bukh riy dan Muslim dapat dijelaskan bahwa niat untuk mengerjakan segala sesuatu karena Allah maka dia akan mendapatkannya dan niat karena dunia maka dia akan mendapatkannya juga sesuai yang diniatkan. Kebanyakan wajib pajak saat ini memang membayar pajak tepat waktu karena takut sanksi atau denda. Ibu Megawati Pratiwi mengatakan bahwa seandainya tidak ada sanksi ataupun denda saya tetap membayar pajak, kita membayar pajak tepat waktu sebenarnya karena denda dan sanksi disamping itu ada kesadaran yang memberikan motivasi.

Dalam penelitian Alm (2013) yang dikutip oleh Mangoting et. Al (2013:107) bahwa motivasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya termasuk melaporkan SPT tahunan karena takut denda administrasi, takut akan dilakukan pemeriksaan, dan masalah tarif pajak. Tarif pajak misalnya yang akan memberikan perencanaan untuk mengurangi dan menghindari pembayaran pajak dengan tarif yang tinggi. Pajak yang seharusnya dibayarkan dikurangi dan keseluruhan penghasilan terutama penghasilan dari pekerjaan bebas tidak disetahunkan.

Akan tetapi dalam penelitian Alm juga menyebutkan bahwa sebenarnya wajib pajak tidak selamanya berperilaku seperti dalam teori kriminologi melainkan termotivasi oleh banyak faktor seperti norma-norma sosial, moralitas, akuralisme dan

keadilan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh beberapa informan bahwa mereka tidak hanya membayar pajak karena takut denda dan sanksi tapi lebih kepada kesadaran bahwa kewajiban merupakan sesuatu yang harus dijalankan bukan karena adanya sanksi atau denda tapi iuran pajak untuk kemakmuran rakyat. Ibu sulistianingsih mengatakan bahwa

pajak merupakan suatu kewajiban yang harus kita bayarkan. Terlepas dari pembayaran pajak kita sebagai ummat muslim masih membayar zakat, tetapi itukan berbeda. Pajak digunakan untuk kemaslahatan dan manfaatnya akan kembali kepada kita juga. Fasilitas negara yang kita gunakan kan berasal dari pajak.

Dalam surah Al-Baqarah ayat 267 dijelaskan:



Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dari ayat ini Allah SWT mengingatkan kita sebagai ummatnya untuk mengeluarkan sebagian dari hasil yang telah didapatkan. Wajib pajak selaku orang

pribadi yang sudah memiliki penghasilan yang sudah wajib dikenakan pajak diharuskan untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk negara. Dari hasil pernyataan Ibu diatas dapat kita lihat bahwa wajib pajak akan senantiasa membayar pajak jika ada hasil yang dimanfaatkan dari apa yang telah dikeluarkan. Terlebih lagi sebagai suatu kewajiban, dengan adanya hasil, wajib pajak akan membayar pajak dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Dalam *theory of planned behaviour* bahwa niat untuk melakukan segala sesuatu dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah *behavior belief*. Dari teori dijelaskan bahwa wajib pajak akan sadar dan memiliki niat yang kuat untuk membayar pajak apabila pajak yang mereka bayarkan dapat dirasakan dan dilihat hasilnya. Dana pajak yang digunakan sebagai dana pembangunan negara memberikan kepercayaan tersendiri kepada wajib pajak bahwa apa yang mereka bayarkan ada hasilnya.

2. Kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak penghasilan

Kepatuhan wajib pajak merupakan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban yang berkaitan dengan pajak. Wajib pajak dituntut untuk patuh terhadap aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh aturan hukum yang berlaku tetapi juga dorongan dari dalam diri wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor pendidikan, faktor kesadaran keberagaman, faktor kesadaran perpajakan, faktor pemahaman terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan dan faktor rasional. Berbagai aturan yang dikeluarkan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan perpajakan yang beberapa kali dirubah. Aturan sistem

pembayaran pajak yang digunakan Indonesia saat ini adalah *self assesment sistem* yang mana ini digunakan untuk memberikan wewenang untuk menghitung dan melaporkan pembayaran pajak wajib pajak baik pribadi maupun wajib pajak badan. Aturan ini tentunya membutuhkan kesadaran dan kejujuran wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya. Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki kepatuhan terhadap pelaporan dan pembayaran pajak. Dosen selaku PNS tidak dapat menghindari pelaporan dan pembayaran pajaknya karena sudah secara langsung dipotong oleh bendahara yang bersangkutan. Bapak Ismail selaku informan yang memberikan konfirmasi dari hasil penelitian yang mengatakan bahwa

Sejauh ini penerimaan pajak dari UIN Alauddin Makassar itu sudah bagus. Pada tahun 2013, penerimaan pajak yang berasal dari UIN itu mencapai Rp 9,6 Milliar.

Kepatuhan terhadap aturan yang dikeluarkan pemerintah didukung oleh aspek moral untuk menjalankannya. Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari ketaatannya terhadap aturan yang dikeluarkan pemerintah dan menjalankannya dengan sepenuh hati. Wajib pajak diberikan hak oleh wajib pajak untuk melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Pemerintah mengeluarkan aturan-aturan terkait dengan perpajakan untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak. wajib pajak sepatutnya mematuhi aturan-aturan yang telah dikeluarkan. Ibu sulistianingsih mengatakan bahwa

Kita sebagai warga negara yang baik harus mematuhi aturan-aturan yang ada. Dengan demikian kita harus membayarkan pajak sesuai dengan penghasilan yang kita peroleh dan waktu yang telah ditentukan.

Bapak Zulkifli Amir mengatakan saya sebagai warga negara Indonesia harus taat terhadap aturan pemerintah. Selaku wajib pajak saya harus memahami tentang pajak.

Profesionalisme dan kualitas pelayanan aparat pajak menjadi salah satu penyebab patuh atau tidaknya masyarakat terhadap pembayaran pajak. Wajib pajak berusaha menghindari pajak disebabkan adanya kasus penggelapan pajak. Seperti yang dikatakan oleh informan atas nama Bapak Firdaus mengatakan bahwa adanya kasus-kasus seperti itu bisa saja mengurangi keinginan kita untuk membayar pajak. Kita melakukan pembayaran pajak untuk negara tetapi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

Dalam *theory of planned behaviour* bahwa kontrol perilaku juga memiliki pengaruh langsung terhadap perilaku individu yang lainnya. Pengaruh langsung ini terjadi karena adanya kondisi pengendalian yang nyata di lapangan. Artinya, jika niat untuk berperilaku tertentu sudah ada, maka niat itu akan menjadi perilaku ketika kenyataan pengendalian di lapangan memungkinkan untuk melakukannya. Namun, kadangkala perilaku yang timbul tidak sesuai dengan niat semula karena kondisi di lapangan tidak memungkinkan untuk itu, sehingga akan mempengaruhi atau mengubah niat individu. Torgler dan Schneider (2004) dalam Iprianto (2013:165) menemukan bahwa *tax morale* seorang wajib pajak sangat dipengaruhi oleh perilaku kepatuhan wajib pajak lainnya. Jika wajib pajak meyakini bahwa *tax evasion* merupakan hal umum, maka *tax morale* akan semakin rendah, dan sebaliknya.

Pajak penghasilan yang dibebankan kepada wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi tergantung dari golongan masing-masing individu. Pegawai negeri sipil dalam hal ini dosen selaku wajib pajak orang pribadi tentunya setiap bulannya dipotong pajak sesuai dengan penghasilan yang diterima. Institusi yang membawahi memotong secara langsung pajak yang dibayarkan. Bapak Muh. Amrih Rikardo yang mengatakan bahwa:

karena status saya sebagai PNS maka SPT setiap tahunnya dilaporkan. Kita sebagai PNS sulit untuk menyembunyikan pendapatan yang diperoleh karena

memang kita sudah ditau bahwa golongan sekian, masa kerja sekian dan sekali penghasilan setiap bulannya jelas sehingga perhitungan pajaknya mudah.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa dosen selaku pegawai negeri sipil patuh dalam melaporkan secara kewajibannya. Kepatuhan tersebut tergolong dalam kepatuhan formal yang mana kewajiban dibayarkan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dosen sulit dalam menghindari pembayaran pajak atas penghasilan yang diperoleh dari pekerjaannya sebagai pengajar dan berada dibawah instansi pemerintahan. Bapak Muh. Ayub Pratama juga mengatakan bahwa:

Kalau ada penghasilan diluar misalnya ada kegiatan diluar itu tetap dipotong pajaknya sehingga tidak perlu lagi dilaporkan dalam SPT tahunan. Kalau penghasilan sebagai dosen dilaporkan oleh instansi, tapi ada juga yang untuk pribadi yang dilaporkan dan pengisian SPT dilakukan sendiri.

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa kesadaran untuk membayar pajak baik yang bersifat final maupun tidak masih dilakukan oleh Bapak Muh. Ayub Pratama. Pembayaran pajak baik yang berhubungan dengan gaji maupun honor sudah dipotong secara langsung oleh bendahara yang bersangkutan. Wajib pajak yang berada dalam instansi pemerintahan sulit dalam menghindari pembayaran pajaknya.

Pembayaran pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 tentang pajak penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan bebas masih kurang sosialisasi. Sebagian besar dosen mengatakan bahwa mereka tidak melaporkan penghasilan-penghasilan yang diperoleh diluar dari pekerjaan sebagai dosen atau penghasilan utama. Salah satunya Bapak Zulkifli Amir yang mengatakan bahwa

Penghasilan diluar, saya tidak pernah laporkan karena itu sifatnya temporer, biasanya juga penghasilannya tidak seberapa. Mau dilaporkan pun kan tetap tidak dikenakan pajak.

Dari beberapa pernyataan informan, dapat kita lihat bahwa wajib pajak pribadi banyak yang tidak melaporkan penghasilannya terkait dengan penghasilan dari pekerjaan bebas. Hal ini disebabkan karena dosen tidak mengetahui bahwa penghasilan-penghasilan tersebut dilaporkan dalam SPT tahunan dan dikalkulasikan untuk menghitung pajak yang dikenakan. Disamping itu anggapan bahwa penghasilan yang diperoleh tidak seberapa sehingga tidak dilaporkan. Penghasilan diluar dari pekerjaan sebagai dosen yang juga tidak menentu menyebabkan wajib pajak tidak melaporkan penghasilannya secara keseluruhan. Bapak Muh.Amrih Rikardo mengatakan bahwa

Pekerjaan diluar sebagai dosen itu saya tidak pernah laporkan karena ada perguruan tinggi yang memang dia laporkan pajaknya. Ada juga perguruan tinggi swasta tapi saya tidak tahu apakah mereka memotong secara langsung atau tidak. Penghasilan itu kan tidak menentu sehingga untuk menghitung besarnya pajak saya tidak pernah lakukan.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Muh. Ayub Pratama bahwa

kesadaran masyarakat disini yang perlu ditingkatkan. Saya masih menduga bahwa tidak semua penghasilan dilaporkan secara utuh. Apalagi perusahaan-perusahaan, rata-rata saya lihat seperti itu.

Bapak Ismail yang merupakan informan dari kantor pajak yang mengelolah pajak UIN Alauddin Makassar mengatakan bahwa

Sejauh ini, pelaporan surat pemberitahuan pajak penghasilan pegawai negeri yang berasal dari pekerjaan bebas memang masih terkendala. Banyak kemungkinan pegawai negeri tidak melaporkan bukti pemotongan pajak, mungkin karena lupa atau memang yang melaksanakan kegiatan tidak membuat bukti pemotongan.

Penghindaran pajak bisa saja dilakukan melalui penghasilan diluar dari pekerjaan utama dengan tidak melaporkannya dalam SPT tahunan. Penghasilan diluar sebagai dosen masih banyak yang belum melaporkannya dalam SPT tahunan. Hal ini

disebabkan karena anggapan bahwa penghasilannya tidak seberapa sehingga tidak dilaporkan. Padahal bila dilihat dari jumlah pegawai yang memiliki penghasilan diluar dan melaporkan secara tahunan akan mampu menambah penghasilan negara yang lumayan besar. Ketidakpahaman wajib pajak menyebabkan mereka tidak melaporkan dan membayar pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam *theory of planned behaour* dikatakan bahwa niat individu dapat dipengaruhi oleh motivasi dari pihak lain. Dirjen pajak memiliki tugas yang besar untuk memberikan sosialisasi sehingga wajib pajak dapat memahami tentang pajak yang berkaitan dengan pekerjaan bebas.

Penerapan *self assesment sistem* dalam pemungutan pajak juga memerlukan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan sejumlah kewajibannya sesuai dengan aturan dan tarif yang berlaku. Wajib pajak yang memiliki pekerjaan diluar dari usahanya diberikan hak untuk mengkalkulasikan penghasilannya dan menghitung jumlah penghasilan yang kena pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 46 tahun 2013 dijelaskan bahwa peredaran bruto merupakan peredaran bruto dari usaha, termasuk dari usaha cabang, selain peredaran bruto dari usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan. Jenis pekerjaan bebas berdasarkan undang-undang tersebut seperti yang dibahas sebelumnya bahwa pekerjaan bebas merupakan pekerjaan diluar dari pekerjaan utamanya.

Wajib pajak pribadi yang berada dibawah instansi sulit untuk melakukan penghindaran pajak. Pajak yang dikenakan secara langsung dihitung dan dipotong oleh bendahara yang bersangkutan. Kesadaran dan kejujuran dari pegawai negeri sipil yang dibutuhkan oleh otoritas pajak adalah pelaporan penghasilannya diluar dari

pekerjaan sebagai dosen. Melihat realitas yang ada saat ini bahwa dosen tidak hanya berprofesi sebagai dosen akan tetapi ada yang memiliki pekerjaan berkaitan dengan keahlian yang dimiliki. Dosen bisa saja memiliki pekerjaan sampingan seperti auditor, pelatih, penceramah dan lain sebagainya yang memiliki penghasilan tertentu. Penghasilan tersebut disetahunkan dan dikenakan pajak sesuai dengan tarif yang dikenakan berdasarkan aturan yang berlaku.

Wajib pajak yang memiliki penghasilan diluar dari pekerjaan utamanya seharusnya dilaporkan dalam SPT tahunan. Dosen yang memiliki penghasilan diluar sebagai dosen seperti penasehat, penyuluh, akuntan, penceramah, pengarang, peneliti dan lain sebagainya yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 46 tahun 2013 dilaporkan dalam SPT tahunan. Wajib pajak tidak hanya dituntut untuk patuh dalam pembayaran pajak tetapi juga patuh dalam bentuk materil. Pembayaran pajak yang berhubungan dengan pekerjaan bebas harus dilaporkan. Beberapa informan mengatakan bahwa mereka tidak pernah melaporkan penghasilan-penghasilan yang diperoleh diluar dari gaji dan honor yang mereka terima. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh faktor pemahaman wajib pajak terhadap aturan-aturan dalam perpajakan.

Wajib pajak tidak selalu patuh dalam membayar kewajiban pajaknya terutama pelaporan keseluruhan penghasilan baik dari pekerjaan tetap maupun pekerjaan bebas. Upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak disebabkan oleh kejadian yang membentuk watak dan sikap mereka untuk tidak patuh dalam membayar pajak. Kejadian seperti adanya kasus penggelapan dana pajak, kebocoran dana dan lain sebagainya menyebabkan hilangnya kepercayaan kepada pemerintah. Bapak Zulkifli amir mengatakan bahwa

banyaknya kasus penggelapan pajak yang dilakukan otoritas pajak jelas mempengaruhi keinginan kita untuk membayar pajak. Banyaknya kasus

tersebut yang menyebabkan kita seakan-akan tidak ikhlas membayar pajak, meskipun tidak ada masalah kita masih bertanya-tanya dikemanakan iuran yang kita bayarkan. Siapa yang bisa melacak uang pajak dan kesejahteraan rakyat yang dijanjikan. Siapa yang bisa menjamin bahwa masyarakat sejahtera.

Pelayanan pajak, kasus penggelapan pajak dan lain sebagainya dapat mempengaruhi wajib pajak untuk patuh atau tidak dalam membayar pajak. *Theory of planned behaviour* juga dilandasi pada postulat teori yang menyatakan bahwa perilaku merupakan fungsi dari informasi atau keyakinan/ kepercayaan yang menonjol mengenai perilaku tersebut. Wajib pajak akan melihat hasil dari apa yang dibayarkan sehingga melahirkan keyakinan apakah mau melakukan atau tidak (*perceived behavioral control*). Wajib pajak pribadi memiliki kesadaran dan niat untuk membayar pajak mengingat pajak adalah kewajiban akan tetapi keyakinan tersebut bisa saja berubah ketika timbul berbagai kasus pajak sehingga mempengaruhi perilaku wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak juga dipengaruhi oleh pelayanan dan perilaku pemerintah dalam mengelolah dana pajak. Dalam *theory of planned behaviour* dijelaskan bahwa niat dipengaruhi oleh tiga faktor, salah satunya adalah *normatif belief* yang mana dalam teori ini dijelaskan bahwa tekanan sosial dan lingkungan dapat memberikan motivasi seseorang dan berniat untuk mengerjakan sesuatu. Wajib pajak patuh dalam membayar pajak apabila ada yang memberikan motivasi seperti teman dekat, konsultan pajak, dan keluarga. Dosen yang berada dalam suatu instansi memiliki tingkat kepatuhan dalam pelaporan pajak penghasilan final. Bendahara secara langsung menghitung dan memotong pajak penghasilan sehingga ketidakpatuhan bisa dihindari untuk wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak

hanya mengisi SPT dan melaporkannya ke kantor pajak. Beberapa informan juga mempertegas hal ini, salah satunya Bapak Muh. Ayub Pratama mengatakan bahwa

Setiap tahunnya kita menerima SPT untuk melaporkan dan menyetorkan ke kantor pajak. Kalau honor sudah dipotong langsung oleh bendahara. Semua dosen dan karyawan juga begitu, setiap ada penghasilan langsung dipotong pajaknya.”

Sedangkan Bapak Adam Yahya mengatakan

Kalau gaji dan honor bagian keuangan yang menghitung dan melaporkan langsung pajak yang terutang, tinggal kartu pembayaran pajak yang diberikan kepada pemilik NPWP sehingga tidak melakukan pembayaran lagi di kantor pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 192/ PMK.03/ 2007 tentang kriteria patuh pajak, dosen sudah memenuhi kriteria patuh. Hal ini karena dosen berada dalam suatu instansi yang secara langsung pajak penghasilannya dipotong oleh bendahara. Dosen sulit untuk mau menunggak atau menghindari pembayaran karena penghasilan dan masa jabatan yang dimiliki sangat jelas. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Muh. Amrih Rikardo bahwa PNS saya kira sulit untuk berkelik dari pendapatannya karena memang kita sudah ditau bahwa golongan sekian, masa kerja sekian sehingga penghitungan pajaknya mudah. Bapak Zukifli Amir menambahkan bahwa apapun yang menjadi aturan pemerintah kita ikuti saja, meskipun kita bilang jangan dipotong tapi tetap saja dipotong gajinya karena itu memang sudah tersistem.

Dalam undang-undang juga disebutkan bahwa kriteria kepatuhan salah satunya berkaitan dengan teguran dan denda. Dosen sebagai PNS jarang bahkan tidak pernah mendapatkan surat teguran untuk pajak penghasilannya. Semua informan

mengatakan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan surat teguran atau denda karena terlambat dalam membayar pajak. Disamping pajak penghasilan, pembayaran pajak lainnya juga belum pernah mendapatkan sanksi atau denda.

Kepatuhan terhadap aturan yang berasal dari dalam diri individu untuk melaksanakan kewajibannya merupakan faktor internal yakni kesadaran. Penerapan aturan self assesment sistem ini diharapkan dapat meningkatkan moral dan kepatuhan wajib pajak. Penerapan aturan ini dapat memberikan motivasi kepada masyarakat pada umumnya untuk membayar pajak. Penerapan aturan perpajakan yang dikeluarkan pemerintah bisa dioptimalkan jika pelayanan dan pengawasan tetap dilakukan. Terkait upaya penegakan hukum perpajakan dalam hubungan nya dengan konsep kepatuhan sukarela maka kita harus pahami bahwa *Self assessment system* bukanlah sebuah *voluntary system*, dimana diasumsikan bahwa Wajib Pajak akan dengan sukarela mematuhi nya walaupun hal itu secara ekonomis merugikannya. Anggapan itu sungguh salah, logikanya Wajib Pajak akan berupaya membayar pajak sekecil-kecilnya. Oleh karena itu peraturan pajak harus dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dapat “memaksa” Wajib Pajak untuk membayar pajak dengan benar, yaitu dengan memberikan kewenangan kepada otoritas pajak untuk menguji kebenaran isi SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Di sinilah pentingnya prinsip keseimbangan atau proporsionalitas, dimana Wajib Pajak juga mendapatkan sesuatu dari apa yang dibayarkannya berupa hak untuk mendapatkan barang dan jasa publik secara layak. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Muh.

Ayub Pratama mengatakan bahwa sebenarnya aturan-aturan yang dikeluarkan pemerintah sudah bagus hanya butuh pengawasan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

3. Pemahaman wajib pajak dalam menghitung, melaporkan dan membayar pajak penghasilan

Pemahaman wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku. Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah sistem self assessment yang merupakan sistem yang mempercayakan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, membayarkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Di dalam sistem pemungutan pajak seperti ini tentu diperlukan berbagai macam peraturan yang digunakan sebagai alat kontrol dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan ini juga berpengaruh terhadap sukses atau tidaknya penerapan sistem pemungutan self assesement ini. Wajib pajak memerlukan pemahaman mengenai apa yang akan dibayarkan, berapa jumlah dan bagaimana cara pelaporan dan pengisian SPT tahunan atas penghasilan. Penghasilan yang dikenakan pajak pajak, tarif dan bagaimana perhitungannya sangat dibutuhkan wajib pajak. Pemahaman setiap individu berbeda-beda tergantung dari keinginan untuk mengetahui, tingkat pendidikan, profesionalisme, lingkungan, pengalaman dan pelayanan wajib pajak.

Pemahaman yang luas memberikan nilai tersendiri bagi individu dan memudahkan dalam berbagai hal. Pengetahuan sangat dibutuhkan dalam menjaankan segala aktivitas. Allah SWT menuntut ummatnya untuk senantiasa mencari ilmu

pengetahuan yang banyak agar mampu memahami dan tetap berada di jalan yang benar. Dalam QS. At-Taubah ayat 122 dijelaskan:



Terjemahan:

tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.

Ayat tersebut memperingatkan untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan pengetahuan yang luas. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang luas tentang pajak akan mengetahui kewajiban-kewajibannya sehingga tidak memiliki hutang kepada negara. Wajib pajak pribadi yang memiliki pemahaman tentang pajak dapat mengikuti aturan dan dapat memahami serta mudah dalam menghitung dan melaporkan pajaknya. Pemahaman wajib pajak tentang pajak dapat memberikan motivasi bagi wajib pajak untuk membayar pajak. Dibandingkan dengan wajib pajak yang kurang memahami akan mudah menghindari pembayaran pajak bukan karena takut dengan sanksi atau denda namun karena ketidakpahamannya tentang pajak. Menurut hasil penelitian Ardianto (2012) menyatakan pemahaman self assessment sistem berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, begitu

juga dengan hasil penelitian Syahril (2013) yang menyatakan tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Realitas saat ini bahwa kebanyakan wajib pajak tidak memahami tentang aturan dan tata cara perpajakan. Masih banyak wajib pajak yang belum paham secara terperinci terkait segala peraturan perpajakan. Sehingga penerapan sistem pemungutan pajak *self assessment sistem* bisa dikatakan masih jauh dari titik optimal.

Bapak Firdaus juga mengatakan bahwa

Kalau menghitung sendiri pajak yang harus dibayarkan saya kira itu sulit. Karena saya juga tidak terlalu paham tentang pajak.

Hal ini memberikan gambaran bahwa penerapan self assesment sistem belum optimal dikarenakan kurangnya pemahaman wajib pajak tentang aturan pajak. Kurangnya pemahaman disebabkan karena faktor pekerjaan wajib pajak yang bukan berasal dari lingkup perpajakan atau yang berhubungan dengan ekonomi. Tentunya ketidakpahaman ini mengharuskan pemerintah untuk memberikan sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan. Pelayanan pajak dibutuhkan oleh wajib pajak untuk memberikan pemahaman yang luas sehingga wajib pajak taat dan patuh dalam membayar pajak. Dalam *theory of planned behaviour* dikatakan bahwa niat individu dipengaruhi oleh faktor orang lain yang memberikan motivasi untuk mengerjakannya. pelayanan yang baik dari otoritas pajak dapat membangkitkan semangat wajib pajak untuk mau mempelajari dan memahami tentang tata cara pembayaran pajak bahkan mendalami pengetahuan tentang pajak. Allah SWT memberikan peringatan untuk menuntut ilmu yang sebanyak-banyaknya.

Pelaporan penghasilan yang dikenakan pajak dibutuhkan pemahaman tentang tarif dan penghasilan kena pajak. Wajib pajak yang memiliki penghasilan baik bersifat final maupun tidak seharusnya memiliki pemahaman tentang pajak.

Penghasilan yang berasal dari luar pekerjaan utama sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2013 untuk yang dikenakan pajak dan dilaporkan dalam SPT tahunan. Wajib pajak memerlukan pemahaman tentang berbagai aturan pajak untuk memudahkan dalam pelaporan dan perhitungan pajaknya. Dalam Undang-undang ini dibuat untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu, perlu memberikan perlakuan tersendiri ketentuan mengenai penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang.

Pembayaran pajak yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil yang berada dibawah instansi biasanya diwakili oleh bendahara yang bersangkutan. Pembayaran dan pengisian SPT yang diwakilkan mengurangi pemahaman wajib pajak. Hal ini juga mengurangi optimalisasi pelaksanaan *self assesment sistem*. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang luas tentang aturan dan tata cara perpajakan akan melaksanakan dan mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ibu megawati mengatakan

saya kira kalau menghitung sendiri tidak semua orang tahu berapa persen seperti pembayaran pajak kendaraan. Kita tidak tahu berapa persen yang harus dibayarkan sehingga kita hanya menyerahkan secara langsung kepada petugas pajak.

Ibu sulistiangingsih juga mengatakan bahwa

Saya kira kalau menghitung sendiri, masyarakat akan sulit. Saya saja sebagai dosen terkadang mengalami kesulitan. Apalagi sistem perhitungannya yang rumit. Masyarakat seharusnya ditunjukkan langsung dan diberikan penjelasan bahwa sekian yang harus dibayarkan. Petugas pajak harusnya memberikan penjelasan-penjelasan terhadap wajib pajak.

Dari hasil pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa tidak semua wajib pajak memiliki pemahaman tentang pajak. Dengan demikian, penerapan sistem pemungutan pajak yang digunakan pemerintah yakni aturan *self assessment sistem*

belum optimal. Otoritas pajak memiliki kewajiban untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat semua informasi yang berkaitan dengan pajak. Dalam *theory of planned behaviour* diungkapkan bahwa niat untuk mengerjakan sesuatu dipengaruhi oleh keyakinan normatif (*normatif belief*). Wajib pajak memiliki niat untuk membayar pajak jika ada motivasi dari petugas pajak dengan cara memberikan pemahaman terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan pajak. seperti perhitungan pajak, penghasilan yang dikenakan pajak, cara pengisian SPT, dan aturan lainnya yang berhubungan dengan pajak.

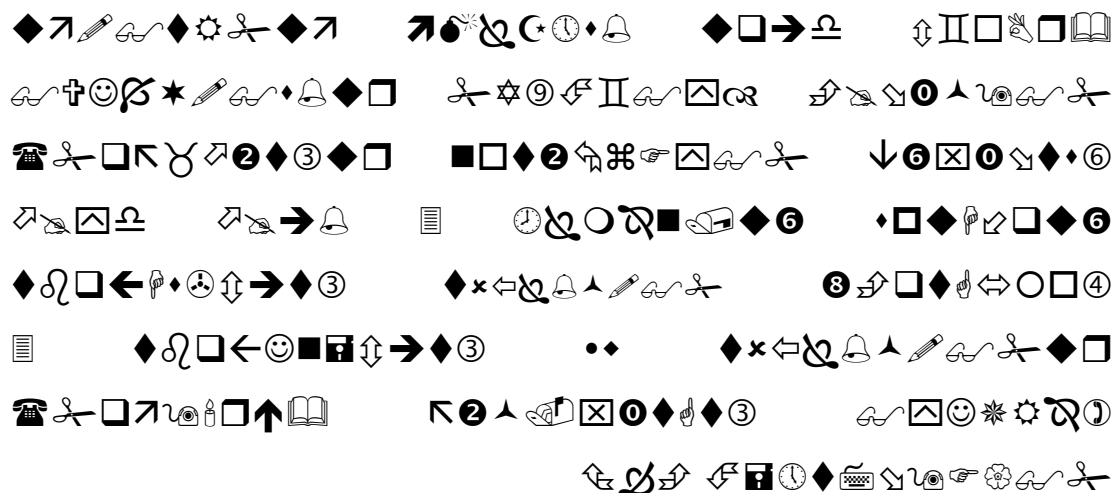
Pemahaman tentang pajak dapat memudahkan wajib pajak dalam melakukan perhitungan, pelaporan dan pembayaran pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang pajak akan dengan mudah membayar pajak penghasilannya dibanding wajib pajak yang memiliki pemahaman yang kurang. Semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap aturan dan sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan mengetahui sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP.

Wajib pajak yang memiliki pemahaman tentang pajak akan mudah dalam melakukan pelaporan dan pembayaran sendiri. Pengetahuan dan pemahaman tersebut diaplikasikan dalam menghitung pajak yang teutang, pengisian SPT tahunan, melaporkan pembayaran pajak dan lain sebagainya. Ibu megawati mengatakan bahwa Saya melakukan pengisian SPT sendiri dan melaporkannya langsung ke kantor pajak. Tapi kalau menghitung saya kira sulit untuk melakukannya. Apalagi itu bukan pekerjaan saya.

Bapak Ismail mengatakan bahwa

Tidak semua wajib pajak pribadi memahami tentang bagaimana menghitung pajaknya tetapi kalau pegawai negeri sipil penghasilan-penghasilan yang diperoleh langsung dipotong oleh bendahara. Kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi itu sudah dipotong sebelum diberikan kepada yang bersangkutan, tapi bukti pemotongannya itu harus dilaporkan ke kantor pajak oleh pemilik NPWP.

Wajib pajak pribadi yang memiliki pemahaman akan melaksanakan aturan-aturan dan patuh terhadap pajak. Kepatuhan juga didasari oleh moralitas yang dimiliki oleh wajib pajak. wajib pajak akan patuh apabila memiliki kesadaran dan moral yang tinggi. Wajib pajak bisa saja tidak membayar pajak karena ketidaktahuan mereka tentang aturan-aturan yang berlaku. Meskipun moral yang dimiliki tinggi akan tetapi pengetahuan tentang pajak yang kurang bisa menyebabkan ketidakpatuhan. Wajib pajak yang memiliki pemahaman dan pengetahuan yang luas dapat memperoleh banyak manfaat dari ilmu yang dimiliki. Dibandingkan dengan wajib pajak yang kurang pemahaman. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat Az-Zumar ayat 9 sebagai berikut;



Terjemahan:

(apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak

mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.

Dari ayat diatas dapat dilihat bahwa jelas perbedaan antara orang yang memiliki pengetahuan yang banyak dengan yang kurang memahami. Wajib pajak yang kurang memahami tentang perpajakan akan mengalami kesulitan baik dalam melakukan pengisian SPT maupun membayar pajaknya. Ketidaktahuan dapat menyebabkan wajib pajak melanggar aturan-aturan yang seharusnya dipatuhi. Seperti halnya dengan pajak yang harus dikenakan pajak, karena ketidak tahuannya sehingga ia tidak membayar pajak. Wajib pajak seharusnya mencari pengetahuan yang banyak sehingga memiliki pemahaman dan pengetahuan yang luas.

Wajib pajak memiliki hak untuk memahami tentang sanksi dan denda yang dikeluarkan pemerintah atas keterlambatan pembayaran pajak. Sanksi dan denda diberikan kepada wajib pajak atas keterlambatan pembayaran pajak. Ibu Megawati yang merupakan salah satu responden mempertanyakan apakah ada denda kalau kita tidak melaporkan dan membayar pajak?. Pertanyaan Ibu tersebut memberikan gambaran bahwa beliau tidak memahami tentang ketentuan yang mengatur tentang sanksi dan denda dalam perpajakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, sanksi keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan wajib pajak orang pribadi adalah Rp.100.000,00, Sedangkan sanksi untuk keterlambatan pembayaran pajak adalah berupa bunga 2% per bulan yang dihitung dari berakhirnya batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan sampai tanggal pembayaran, sanksi untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP adalah sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak

atau kurang dibayar. Sanksi pidana berupa penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan wajib pajak orang pribadi, paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun pajak. Sedangkan batas waktu pembayaran, paling lambat sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan (30 Maret). SPT harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar yang berasal dari rakyat. APBN dari 3 (tiga) tahun terakhir terbesar berasal dari pajak sebesar 70%, 1600 pendapatan yang terdiri dari 1200 triliun pembagian dari migas dan nonmigas. Pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai memiliki kaitan erat dalam artian bahwa semakin banyak penghasilan maka pertambahan konsumsi masyarakat juga bertambah. Untuk pajak penghasilan non-migas, pada periode 1 Januari- 31 Desember PPh 21 memberikan kontribusi terbesar kedua setelah PPh 25/ 29. UIN Alauddin Makassar memberikan kontribusi besar dalam penerimaan pajak tahun 2013 sebesar 9,6 Miliar. Pajak penghasilan pribadi merupakan salah satu penyumbang terbesar ke kas negara. Penghasilan negara dapat dioptimalkan dari pajak penghasilan pribadi dengan melihat jumlah penduduk usia kerja yang besar.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara secara langsung terhadap dosen Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Aspek moralitas yang merupakan unsur intrinsik dari dalam diri individu dapat memberikan kesadaran dan keinginan dalam melakukan pembayaran pajak. Sebagian besar dosen memiliki moral yang tinggi terkait dengan kesadaran dalam membayar pajak. Dosen di UIN Alauddin Makassar menganggap pajak sebagai suatu kewajiban yang harus dibayarkan. Pajak dianggap pembayaran yang dilakukan untuk kemaslahatan rakyat dan akan dipertanggung jawabkan tidak hanya kepada negara tetapi juga kepada Allah SWT. Denda dan sanksi bukanlah

alasan mengapa mereka mau membayar pajak tetapi karena merupakan suatu kewajiban sehingga harus membayar pajak dari penghasilan mereka. Permasalahan yang terjadi dilingkup otoritas pajak tidak menjadi penghalang untuk melakukan pembayaran pajak. Kejujuran dan kesadaran dalam pelaporan dan pembayaran pajak penghasilan masih dimiliki oleh Dosen UIN Alauddin Makassar.

2. Dilihat dari aspek kepatuhan, dosen yang berada dibawah instansi pemerintahan sebagai pegawai negeri sipil memiliki kepatuhan terhadap pembayaran pajak penghasilan. Pajak dosen secara langsung dipotong oleh bendahara yang bersangkutan. Penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan bebas dipotong oleh pihak-pihak yang bersangkutan sehingga dosen hanya memperoleh bukti pemotongan. Adapun penghasilan-penghasilan lain yang tidak dilaporkan karena dianggap bahwa jumlahnya tidak seberapa dan tidak kena pajak sehingga tidak dilaporkan.
3. Pelaporan pajak penghasilan sebagian besar dosen melakukan pengisian SPT tahunan sendiri dan melaporkannya langsung ke kantor pajak. Namun ada beberapa yang pelaporan dan pembayarannya diwakilkan. Dosen yang mendapatkan penghasilan diluar dari gaji pokok biasanya diberikan bukti pemotongan dan dilaporkan dalam SPT tahunan. Pelaporan pajak penghasilan dari pekerjaan bebas sebagian tidak dilaporkan. Hal ini disebabkan karena wajib pajak tidak memahami dan tidak tahu bahwa penghasilan tersebut harus dilaporkan dalam SPT tahunan dengan cara disetahunkan. Wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak atas penghasilan dari pekerjaan bebas bukan disebabkan karena mereka tidak mau membayar pajak akan tetapi karena

ketidapkahaman dan ketidaktahuan. Oleh karena itu, otoritas pajak memiliki tanggungjawab besar untuk melakukan sosialisasi dan himbauan, serta mengingatkan wajib pajak tentang keberadaan pajak penghasilan diluar dari peredaran bruto tertentu atau penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan bebas.

B. SARAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan, peneliti melihat bahwa masih banyak yang harus dijalankan oleh pemerintah khususnya otoritas pajak yang bertugas dalam pemungutan pajak. Dirjen pajak disarankan untuk memberikan sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan diwilayah kampus untuk memberikan pemahaman tidak hanya kepada mahasiswa tetapi juga dosen yang merupakan wajib pajak pribadi. Dirjen pajak sebaiknya melakukan kerja sama dengan Universitas-Universitas tidak hanya di UIN Alauddin Makassar tapi keseluruhan baik negeri maupun swasta untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada dosen dan pegawai serta mahasiswa dengan tujuan dapat meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak mengingat bahwa pajak merupakan sumber pendapatan negara. Pengetahuan yang luas memberikan nilai positif sendiri untuk diri kita sendiri, olehnya itu sepatutnya kita menuntut ilmu yang sebanyak-banyaknya.

Penelitian ini masih banyak kekurangan, terutama informasi yang diperoleh yang bersifat tertutup. Disamping itu waktu penelitian yang cukup singkat. Informasi yang diperoleh dari kantor pajak juga tidak terlalu spesifik sehingga diharapkan penelitian selanjutnya memperpanjang waktu dalam melakukan penelitian yang terkait dengan penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, Icek, "The Theory Of Planned Behaviour, *Organizational Behavior And Human Decision Processes* 50, (1991) h:179-211.
- Ardianto, M, 2012. Pengaruh Pemahaman Self Assessment System, Sanksi Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tigaraksa. *Skripsi Akuntansi*, 2012.
- Al- Bukhari Muslim <http://sunnah.com/bukhari/1>
- Al-Quran dan terjemahan, Departemen Agama RI, Jakarta: Bumi Restu, 1976
- Ardi, Mulia, Etika Perpajakan Berbasis Etika Pancasila, *Jurnal Madani Edisi 1*, 2012
- Basrowi Dan Suwandi Basrowi Dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Cahyonowati, Nur, "Model Moral Dan Kepatuhan Perpajakan", *JAAI* 15, No.2, (2011), h:161-177,
- Chaerunnisa, "Analisis Tingkat Pengaruh Tingkat Penghasilan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Spt Tahunan Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kembangan Jakarta Barat", Skripsi. Jakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010
- Fikriningrum, 2012, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak" (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari), Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Frey Dan Feld, Deterrence And Morale In Taxation: An Empirical Analysis, *Cesifo Working Paper No. 760*, , 2002
- Handayani, Sapti Wuri, Agus Faturokhman Dan Umi Pratiwi, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas, Universitas Jenderal Soedirman
- Hardiningsih, Pancawati, 2011, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak", *Dinamika Keuangan Dan Perbankan* 3, No. 1, h: 126-142.
- Hidayat, Widi Dan Argo Adhi Nugroho, 2010, "Studi Empiris *Theory Of Planned Behavior* Dan Pengaruh Kewajiban Moral Pada Perilaku Ketidakpatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi", *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 12, No. 2, November 2010: 82-93
- Hutagoal, John, Wing Wahyu Winarno dan Arya Pradipta, 2007, "Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak", *Akuntabilitas* 6 No.2, H: 186-193
- Indriantoro Dan Bambang , 2013, "*Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Manajemen*", Yogyakarta: BPFE.

- Iprianto, “Perbedaan Persepsi Wajib Pajak Perorangan Dan Wajib Pajak Tenaga Ahli Terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System* Di Kota Bengkulu, *Media Ekonomi Dan Manajemen* 27. No 1, 2013.
- Jotopurnomo, Cindy Dan Yenni Mangoting, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya” *Tax & Accounting Review* 1, No.1, 2013
- Kompas, “Penerimaan Pajak 2012 Meleset dari Target Ekonomi”, 2013
- Komarawati, Dewi Rina Dan Mukhtaruddin, “Analisis Tingkat Kepatuhan Dan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Di Kabupaten Lahat, *Universitas Sriwijaya*”, t.th ,t.t.
- Mangoting, Yenni dan Arja Sadjiarto, “Pengaruh Postur Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 15, No. 2, 2013, h: 106-116
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2011* .Yogyakarta: Penerbit Andi. 2011.
- Masruroh, sitti, 2013, Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wp Op Di Kabupaten Tegal), skripsi, Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
- Moleong, J Lexy, Prof. Dr, “*Metode Penelitian Kualitatif*”. Bandung : Pt. Remaja Rosdakaya, 2009.
- Pratiwi, I G. A. M. Agung Mas Andriani Dan Putu Putu Ery Setiawan, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan Perusahaan, Dan Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Di Dinas Pendapatan Kota Denpasar”, *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 6.1, (2014):139-153.
- Republik Indonesia, Kementrian Keuangan, Nota dan APBN tahun 2013, 2014
- Republik Indonesia. “Undang-Undang Ri Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, 2007.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Ri Nomor 46 Tahun 2013 pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, , 2013.
- Slemrod, Joel, “Cheating Ourselves: The Economics Of Tax Evasion”, *Journal Of Economic Perspectives* 21, No. 1, (2007) h: 25-48
- Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Methode*), Bandung: ALFABETA, 2013.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: ALFABTA, 2009

- Sulistiyono, Adincha Ayuvisda, 2012 Pengaruh Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Usahawan (Studi Di Sentra Produksi Manik-Manik Desa Plumbongambang, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur), Universitas Negeri Surabaya.
- Syahril, F, 2013. Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Tngkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Orang Pribadi (Studi Empiris pada KPP Pratama Kota Solok). *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Torgler, Benno, “Tax Moral And Institution, Center For Research In Economics, Management And The Arts, Working Paper No. 2003 – 09, 2013
- Tresno, Indra Dan Wulan, “Pengaruh Penambahan Wajib Pajak Badan, Penyampaian Spt Masa Pph Badan Dan Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Bdana Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Di Kpp Pratama Jakarta Mataram, t.th ,t.t.
- Troutman, Coleen S, 1993, Moral Commitmen to Tax Compliance as Measured by the Development of Moral Reasoning and Attitutes Towards The Fairness of The Tax Laws, Dissertation, Oklahoma State University, USA.
- Thurman, Quint C.Craig St. John and Lisa Riggs. 1984, Neutralization and Tax Evasion: How Effective Would a Moral Appeal be In Improving Compliance to Tax Law? Law and Policy, Vol. 6 No. 3; 309-327
- Winerungan, Oktaviane Lidya, “Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung”, *Jurnal EMBA* 1, No.3 (2013): 960-970.

PERTANYAAN PENELITIAN

1. Apa yang menjadi indikator utama sehingga bapak/ ibu membayar pajak?
2. Bagaimana pendapat bapak/ ibu terkait dengan penggelapan pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak?
3. Apakah pelanggaran aturan pajak atau ketidak patuhan terhadap peraturan pajak merupakan suatu pelanggaran etika?
4. apakah kebijakan tentang perpajakan yang dibuat oleh pemerintah sudah tepat atau belum?
5. Apa yang menjadi kendala dalam peningkatan pajak?
6. Bagaimana pendapat bapak/ ibu tentang aturan self assesment sistem?
7. Apakah bapak/ ibu yang secara langsung menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dalam SPT tahunan?
8. Apakah semua penghasilan dan penambahan harta dilaporkan dalam SPT tahunan?
9. Apakah SPT tahunan yang disampaikan sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan dan sesuai dengan kenyataannya?
10. Apakah anda pernah mendapat surat teguran atau denda atas keterlambatan pembayaran pajak? Mengapa hal itu bisa terjadi?

RESUME WAWANCARA

Nama informan : Adam Yahya

Jabatan : Dosen

1. Bagaimana pemahaman bapak tentang pajak?

Pajak itu kan suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh si wajib pajak. Kalau saya karena itu adalah suatu kewajiban.

2. Kalau misalnya pak ada penghasilan diluar dari gaji apakah juga dilaporkan dalam SPT tahunan pak?

Bisanya kalau kita mengikuti kegiatan akademik, katakanlah menjadi pengawas ya di umm sudah dipotong diatas berdasarkan golongan jadi hampir kalau ada kegiatan dilingkup hampir semuanya dipotong kalau ada penghasilan diluar gaji.

Kan biasanya pak kita sebagai dosen biasanya kita dipanggil sebagai pembawa materi dan sebagainya. itukan ada penghasilannya pak, apakah itu juga dilaporkan dalam spt tahunan pak?

Pada umumnya tidak, karena SPT tahunan itu sudah dibikin dibiuro, jadi nanti kita dikirim sudah begitu, klo itu kita mau laporkan, hampir tidak pernah, karena kita tidak tau bagaimana formatnya atau dilaporkan dimana, tapi pada umumnya itu sudh dibikinkan

3. Bagaimana pendapat bapak tentang aturan self assesment sistem yg digunkn sebagai sistem pemungutan pajak?

Kalau modelnya seperti kita yang harus membayar pajak, agak susah itu bagaimana kalau mereka mengirimkan bahwa sekian yang harus dibayarkan atau mereka yang datang menjemput atau memberikan pelayanan-pelayanan ditempatnya orang bekerja.

4. Bagaimana pemahaman bapak mengenai pengisian SPT pak?

Kalau mengisi itu yang ada pertanyaanya disitu jadi kt isi sesuai dengan penghasilan sesuai dengan pendapatan yang kita peroleh dari gaji, yang dilaur dari itu kita tidak laporkan.

5. Apakah bapak sendiri menghitung dan melaporkan pajak penghasilan?

Kalau gaji dan honor bagian keuangan yang menghitung dan melaporkan langsung pajak yang terutang. Tinggal kartu pembayaran pajak yang diberikan kepada pemilik NPWP sehingga tidak perlu lagi membayar.

6. Apakah pernah mendapatkan surat teguran atau denda?

Tidak pernah.

RESUME WAWANCARA

Nama Informan : Firdaus

Jabatan : Dosen

1. Bagaimana pemahaman bapak tentang pajak?

Kalau pemahaman saya, saya tidak terlalu paham tentang pajak, biasa-biasa saja. Sebenarnya kita mau membayar pajak asal dimudahkan, artinya begini, jangan sampai kita lagi yang mesti kesuatu tempat untuk membayar pajak ya karena sekarang kita berada di instansi negeri otomatis kan sudah langsung dipotong dengan gaji kita. jadi gaji yang kita terima itu sudah dikurangi pajaknya jadi saya kira itu sudah sangat membantu kita tidak terlalu repot lagi untuk melaporkan pajaknya.

2. Bagaimana pendapat bapak mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang self assesment sistem?

Kalau menurut saya, ada dua sisi, yang pertama kita bisa tau mengenai tata cara perhitungan pajak kita ya kan. Tapi yang tidak baiknya kita punya tambahan pekerjaan lagi untuk melaporkan sendiri uang itu dan menghitungnya sendiri.

3. Kalau ada penghasilan diluar sebagai dosen apakah itu juga dilaporkan dalam SPT pak?

Penghasilan lain diluar misalnya sebagai pengawas, atau pelatih itu sudah terpotong dengan sendirinya, kalau ada honor-honor kegiatan itu sudah dipotong pajaknya.

4. Apakah semua penghasilan dilaporkan pak?

Ya dilaporkan yang maksimal kita tau yang tiap tahun kan.

5. Apakah bapak sendiri yang melaporkan pajak ke kantor pajak?

Ya yang saya alami, kita tiap bulannya mendapat surat pemotongan kemudian dilaporkan dikantor pajak.

6. Apakah bapak pernah mendapat surat teguran atas keterlambatan pembayaran pajak?

Tidak, saya belum pernah mendapat surat teguran atau denda dari kantor pajak. kan selama ini pajak secara langsung dipotong oleh pihak bendahara jadi tidak ada peluang bagi kita sebagai dosen untuk tidak membayar dan melaporkan pajak.

RESUME WAWANCARA

Nama Informan : Ibu Sulistianingsih

Jabatan : Dosen/ Sekertaris jurusan

1. Bagaimana pemahaman ibu tentang pajak?

Ya, pemahaman saya tentang pajak, setiap warga negara wajib harus mengeluarkan pajak untuk negara. Pajak digunakan untuk kemaslahatan dan manfaatnya akan kembali kepada kita juga. Fasilitas negara yang kita gunakan kan berasal dari pajak. Ya saya sih terima dengan baik.

2. Apa yang mendorong ibu untuk mau membayar pajak?

Ya sebagai warga negara harus taat pemerintah. Karena pemerintah kan sudah mengeluarkan aturan setiap pendapatan harus ada pajaknya. Itu yang pertama saya harus taat terhadap aturan. Yang kedua sebagai seorang muslim, setiap apa yang kita peroleh saya harus keluarkan sedekahnya, jadi itu yang memotivasi saya.

3. Kira-kira apakah adanya kasus-kasus seperti itu bisa mempengaruhi keinginan kita untuk membayar pajak?

Iya, sebenarnya ada juga sih perasaan seperti itu sebagai manusia, tapi kalau dilihat ya tidak semuanya juga pengurus pajak seperti itu jadi saya kembali yang apa namanya itu, termasuk orang-orang yang menyelewengkan pajak, mudah-mudahan mereka sadar ya.

4. Bagaimana pendapat ibu mengenai aturan self assesment sistem?

Kalau diberikan kepada masyarakat untuk menghitung sendiri, sebenarnya bagus juga kalau semua masyarakat tau tapi kan tidak semua masyarakat tau. Saya sendiri sebagai dosen terkadang aduh rumitnya ini toh.menghitung-hitungnya rumit sekali jadi saya sarankan bagaimana kalau masyarakat hanya ditunjukkan sekian yang anda harus bayar sekian pajak yang harus anda bayar.karena itu tadi ya tidak semua masyarakat tau bagaimana cara menghitung-hitungnya itu, Cuma umpamanya pemungut pajak itu yang memberikan penjelasan, tapi kan tidak ada penjelasan cara menghitungnya. Saya sendiri kalau bukan dari bagian keuangan yang memberikan kita hitungan-hitungan itu bahwa sekian yang harus dikeluarkan pajaknya ya kita anda tau. Ya memang bagian pajak itu harus memberikan informasi kepada masyarakat.

5. Apakah semua penghasilan diluar sebagai dosen dilaporkan dalam SPT tahunan atau bagaimana?

Iya, semua harta-harta dilaporkan.

6. Bagaimana pemahaman ibu dalam melaporkan pajak dalam mengisi SPT?

Kalau hanya mengisi ya kita tinggal mengisi saja, tapi kalau menghitung saya sendiri belum tau bagaimana cara menghitung pajaknya.

7. Apakah ibu pernah mendapatkan denda atas keterlambatan membayar pajak?

Alhamdulillah, saya belum pernah mendapatkan itu dek.

RESUME WAWANCARA

Nama Informan : Muh.Amrih Rikardo

Jabatan : Dosen/ Ketua Jurusan

1. Bagaimana pemahaman bapak terkait dengan pajak
Pajak itu merupakan kewajiban warga negara ya kemudian setiap tahun harus dilaporkan. Kalau tidak dilaporkan ya konsekuensinya kepada yang bersangkutan Kemudian ya tidak taat terhadap aturan bernegara. Itu tadi sebagai warga negara harus menyisihkan sebagian harta untuk kepentingan bangsa dan negara.
2. Kalau misalnya tdk ada sanksi atau denda apakah kita tetap mau membayar pajak?
Saya kira tetap, bagaimana negara ini dikelola tanpa ada dana. Kan ini pajak sebagai penghasilan negara saya kira pajak ini merupakan penghasilan terbesar negara. ketika masyarakat atau mereka yang punya penghasilan tidak punya pajak apalah jadinya negara ini.
3. Kalau ada penghasilan pak apakah itu juga dilaporkan dalam SPT tahunan?
Iya, dilaporkan bahkan kami langsung melaporkan ke kantor pajak, biasa juga diwakili`. Karena kita sebagai PNS maka SPT setiap tahunnya dilaporkan. Kalau PNS saya kira sulit untuk bergelitik dari pendapatan karena memang kita sudah ditau bahwa golongan sekian, masa kerja sekian kan jelas kita punya penghasilan setiap bulannya sehingga perhitungan pajaknya mudah.
Kalau diluar dari pekerjaan sebagai dosen pak?
Kalau penghasilan diluar sebagai dosen itu saya tidak pernah laporkan karena ada perguruan tinggi yang memang dia laporkan pajaknya. Ada juga perguruan tinggi swasta tapi saya tidak tau apakah dia potong secara langsung atau tidak. Karena biasanya kita sebagai status yayasan atau dosen luar biasa disuatu tempat. penghasilan itu kan tidak menentu sehingga untuk menghitung besarnya pajak saya tidak pernah lakukan.
4. Kalau menghitung pak apakah bapak yang melakukannya sendiri atau bagaimana pak?
Kalau itu kami tdk punya keterampilan disitu, kita berikan saja ke petugas pajak.
Tapi kan ada aturan self assesment sistem pak.
Iya tapi kan harus dipandu kan. Kalau seperti saya ini mana tau mengenai hitung-hitungannya.

RESUME WAWANCARA

Nama Informan : Kurniawan

Jabatan : Dosen/ Ketua Jurusan

1. Bagaimana pemahaman bapak terkait dengan pajak
Pajak itu adalah sebuah kewajiban untuk membiayai operasional negara ini. Sebagai warga negara yang baik untuk membayar pajaknya sebagaimana mestinya.
2. Apakah dengan adanya kasus tersebut bisa mengurangi keinginan kita untuk membayar pajak?
Ya itu bisa saja, kalau pengelolaan pajak itu dikelola dengan baik itu bisa membuat masyarakat itu pesimis. Jadi memang semestinya petugas pajak itu harus jujur dan harus memang diberikan saksi yang tegas supaya jangan melakukan penyelwengan pajak. dan wajar kalau petugas pajak itu diberikan insentif yang lebih ketimbang dengan aparatur negara yang lain karena itu tadi supaya dia bisa konsisten menjalankan tugasnya dengan baik dalam penerimaan pajak.
3. Bagaimana pendapat bapak mengenai kebijakn pemungutan pajak yang dikeluarkan pemerintah?
Saya kira dekorasinya harus jelas ya. Jadi pemerintah itu stiap saat masih kuat regulasi termasuk undang-undang pajak, tarif,PTKP PKP, harus tiap saat dikoreksi dan disesuaikan dengan perkembangan dan tentu sesuai dengan pendapatan per kapita masyarakat. pokoknya adalah bagaiman carnya petugas paja itu melakukan pengawasan yagn lebih bagus. Atau list yang diinginkan untuk meliht siapa2 yg bagus dalam membayar pajak dan sebaliknya.
4. Apakah semua penghasilan dilaporkan dalam SPT tahunan pak?
Karena saya ini tidak ada penghasilan yang cukup untuk dibayarkan pajaknya diluar sebagai dosen saya tidak laporkan. Selama ini kalau ada tugas-tugas lain yang diberikan oleh UIN itukan sudah langsung dipotngkan pajaknya. Diluar dari itu tidak, itu juga harus dipahami bahwa setiap orang mempunyai penghasilan yang diperoleh dari negara maupun dari luar sehingga kita harus punya kemauan untuk melaporkan dan membayar pajak. seharusnya ada kesadaran sendiri untuk mau membayar pajak.
5. Apakah bapak yang mengisi SPT tahunan dan melaporkannya ke kantor pajak?
Pertama iya, tapi selanjutnya biasanya diwakili. Kita biasanya diwakili oleh staf kalau sibuk.

RESUME WAWANCARA

Nama Informan : Megawati Pratiwi
Jabatan : Dosen/ Sekertaris Jurusan

1. Bagaimana pemahaman ibu terkait dengan pajak penghasilan
Kalau saya, gaji itu sudah terpotong pajaknya oleh negara tersesuai dengan golongan, diluar dari itu secara pribadi saya masih mengeluarkan zakat. Jadi pajak menurut saya memang wajib untungnya memang pemerintah secara otomatis secara lagsung memotong. Kalau kita sendiri yang memotong saya kira kita akan mengalami kesulitan, meskipun kita paham bahwa wajib pajak kita ini mau pegawai negeri atau bukan yang jelas warga negara itu wajib membayar pajak.
2. Kalau tidak ada sanksi atau denda apakah kita tetap mau membayar pajak?
Secara pribadi asal itu informasi disosialisasikan dengan baik, terlepas dari ada sanksi atau tidak saya tetap mmebayar pajak. persoalannya adalah sebagai warga negara yang baik, terus terang saya pribadi saya sangat paham bahwa ketika saya menikmati kita sadari bahwa semua fasilitas-fasilitas itu dari pajak, terlepas dari oknum-oknum tertentu yang menyelewngkan itu urusannya. Yang jelas saya berprinsip bahwa saya harus melaksanakan kewajiban, mau diselewengkan atau tidak itu urusannya.
3. *Self assesment sistem*
Selama ini kita rutin melaporkan, saya tidak sepenuhnya melaporkan, membayar atau mengitung sendiri.saya kira kalau mengitung sendiri, tidak semua orang tau berapa persen pembayaran pajak kendaraan misalnya. Jadi kita serahkan saja kepada petugas. Saya serahkan kepada yang lebih paham. Tidak semua tentang tarif pajak dan aturan lainnya diketahui wajib pajak pribadi sehingga dibutuhkan bantuan dari pelayanan pajak dan biasanya pajak yang harus dibayarkann dihitung oleh otoritas pajak. Meskipun kita paham tapi persoalannya adalah terkait dengan pekerjaan.
4. Kalau misalnya bu ada penghasilan diluar dari pekerjaan sebagai dosen kan harus dikalkulasikan dalam SPT apakah ibu sudah menerapkannya?
Selain gaji ya, misalnya difakultas ini kan ada honor2 ya itu sudah dipotong secara langsung oleh panitian atau pengelolah sesuia dengan golongan itu kita laksanakan. Terlepas dari itu yang tidak terkait dengan pekerjaan kita misalnya bisnis atau apakah itu semua, saya tidak melakukan bisnis-bisnis, tapi yang namanya ada penghasilan yang tidak terkait dengan honor atau gaji itu saya belum sosliasiaskan tapi kalau zakat malnya saya lakukan.
5. Apah ibu yang melakukan pengisian SPT sendiri atau bagaimana?
Iya, saya melakukan pengisian sendiri dan melaporkannya kekantor pajak. biasanya juga diwakili. Tapi kalau menghitung saya kira sulit untuk melakukannya. apalagi itu bukan pekerjaan saya.
6. Apakah ibu pernah mendapat surat teguran atau denda?
Tidak pernah.

RESUME WAWANCARA

Nama Informan : Zulkifli Amir

Jabatan : Dosen

1. Bagaimana pemahaman bapak terkait dengan pajak
Yang saya ketahui ya, pajak itu merupakan bagian dari penghasilan kita yang harus dikeluarkan ini sebagai pendapatan negara. Kalau dalam agama sama dengan zakat mungkin. Sebagai warga negara Indonesia harus taat terhadap aturan pemerintah. selaku wajib pajak harus memahami tentang pajak.
2. Apa yang mendorong bapak untuk mau membayar pajak?
Ya yang mendorong saya karena itu untuk pembangunan negara. Selama memang pajak itu digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan dirasakan langsung saya kira sah-sah saja.
3. Bagaimana pendapat bapak mengenai adanya kasus-kasus penggelapan pajak?
Banyaknya kasus penggelapan pajak yang dilakukan otoritas pajak jelas mempengaruhi keinginan kita untuk membayar pajak. banyaknya kasus pajak sehingga kita seakan-akan tidak ikhlas, meskipun tidak ada masalah kita masih bertanya-tanya dikemanakan iuran yang kita bayarkan. Siapa yang bisa melacak uang pajak dan kesejahteraan rakyat yang dijanjikan siapa yang bisa menjamin bahwa mereka sejahtera. Memang ada aturan pajak sehingga itu bersifat memaksa, ya memang membayar pajak karena terpaksa..
4. Apakah penghasilan diluar pekerjaan kita sebagai dosen juga dilaporkan pak?
Oo nda, Saya tidak perlu melaporkan itu. Itu kan sifatnya tidak temporer ya. Itu juga penghasilannya tidak seberapa. Mau dilaporkan pun tetap tidak dikenakan.
5. Apa pendapat bapak mengenai aturan self assesment sistem pak?
Bagi saya ya kita berinisiatif jadi nda ada masalah, tapi kan saya berada dalam institusi sehingga pihak bendahara yang melakukan pencatatan, kita tinggal ambil bukti pemotongannya
6. Apakah bapak pernah mendapat surat teguran atau denda?
Saya belum pernah mendapat surat teguran, apapun yang menjadi aturan pemerintah kita ikut saja. Karena meskipun kita bilang jangan dipotong tapi itu sudah dipotong digajikan karena sudah ter sistem.

RESUME WAWANCARA

Nama Informan : Muh. Ayub Pratama
Jabatan : Dosen/ Pembantu Dekan

1. Bagaimana pemahaman bapak terkait dengan pajak?
Pajak kan iuran kita kepada negara yang wajib kita bayarkan setelah mendapatkan penghasilan. Pajak itu kewajiban kita yang diharuskan untuk dibayarkan demi untuk kepentingan dan pembangunan negara.
2. Melihat banyaknya kasus penggelapan pajak, apakah itu mempengaruhi keinginan kita untuk membayar pajak pak?
Tidak, itu kan persoalan pribadi, kalau persoalan penggelapan kan oknum yang melakukan, tidak usah dikaitkan dengan itu. Karena pajak itu kan kewajiban kita sebagai warga negara sehingga kita harus membayarnya. Apalagi pajak digunakan untuk kemaslahatan rakyat. Terlepas dari yang melakukan itu, itu adalah dosanya dia to, ya tetapi kita kan kalau ditanya dalam wilayah politik ada yang seperti itu. Tapi sebagai orang Islam yang tau tentang agama tidak berpengaruh itu karena dia wajib membayar pajak
3. Apakah pajak penghasilan dilaporkan dalam SPT tahunan?
Orang lain yang melaporkan setelah dihitung. Rata-rata dosen itu masih minus. Setiap tahun kita menirma SPT untuk melaporkan dan menyetorkan ke pajak, kalau honor dipotong langsung. Semua dosen dan karyawan begitu ada penghasilan langsung dipotong.
4. Bagaimana dengan penghasilan diluar pak?
Kalau diluar rata-rata nda, kan klo umpamnya mengikuti kegiatan diluar tetap dipotong disitu sehingga tidak dilaporkan dalam SPT tahunan yang dilaporkan hanya penghasilan tetap.
5. Apakah bapak sendiri yang melakukan pembayaran pajak dan mengisi sendiri SPT?
Kalau penghasilan sebagai dosen itu dilaporkan oleh instansi tapi ada juga yang untuk pribadi yang kita laporkan sendiri, dan melakukan pengisian sendiri. Terkait dengan denda dan teguran kita sebagai PNS tidak pernah mendapat itu.
Kalau penambahan harta, tetap diakumulasi dalam SPT tahunan karena itu setiap tahunnya berubah.
Kalau permasalahan pajak itu tadi terkait dengan aturan itu sebenarnya sudah bagus, hanya saja oknum-oknum yang. Seyogyanya orang Islam itu jangan liat dari persoalan itu karena itu persoalan pribadi harus kita bayarkan.
6. Apakah bapak pernah mendapatkan surat teguran atau denda atas keterlambatan pembayaran pajak?
Tidak pernah, kalau kita PNS tidak pernah mendapatkan yang seperti itu karena kita dibawah instansi. Biasanya yang mendapatkan seperti itu perusahaan-perusahaan yang terlambat melapor atau tidak membayar pajaknya. Kalau kita langsung dipotong pajaknya oleh bendahara.

RESUME WAWANCARA

Nama informan : Ismail

Status/ Jabatan : Pegawai/ A.R Pajak UIN Alauddin Makassar

1. Bagaimana pelaporan pajak dosen UIN saat ini pak?

Sejauh ini penghasilan setiap dosen itu sudah dialokasikan dalam DIPA UIN. Semua gaji dan honor dialokasikan kesana. Semua gaji termasuk honor dialokasikan dlm DIPA dan rutin setiap bln, dan pada saat akan tebayayakan dihitung dulu setiap blnnya tiap blnya. Mekanismenya pemotongannya dipotong di KPPM. Bendahara UIN membuat SPM gaji, ddidalamnya KPPM nanti mengalokasikan dananya. untuk pajak langsung disetorkan oleh KPPM (Kantor pelayanan perbendaharaan negara). untuk pajaknya langsung dipotong dan dilaporkan oleh KPPM. Jadi penghasilannya yg tersistem itu sudah otomatis dipotong.

2. Biasanya ada pekerjaan diluar dari apakah juga dilaporkan dalam surt pemberitahuan pak?

Kalau datanya itu saya tidak bisa kasi lihatkan dek. Tapi kalau misalnya ada pekerjaan seperti misalnya narasumber itu sudah langsung dipotong. Kan peruntukannya sudah jelas dan dianggarkan. Pihak panitia itu sebelum membayarkan honor, dia harus dipotong dulu pajaknya. Kalau golongan 4 itu 15% dia harus dipotong dari nilai honor sebelum diberikan. Pada saat sudah dipotong, panitia harusnya memberikan bukti pemotongan sehingga itu yang harusnya dilaporkan ke kantor pajak. berdasarkan itu, setelah bulan habis bukti potong tersebut dikumpul dan diakumulasikan dan kemudian dibayarkan bukan lagi NPWP UIN . kalau melaporkan semua NPWP wajib melporkan pajaknya. Kalau dosen pelaporan pajaknya itu sekali etahun. Apa yang dia laporkan itu semua bukti potong dan dijumlahkan juga melalui NPWPnya dia. Jumlahkan semua penghasilan yang diperoleh dan dilaporkan dalam surat pemberitahuan. Sebagian besrnya yang diperoleh itu dibayarkan oleh pihak bendahara atau pihak panitia. Wajib pajak hanya melaporkan SPT ke kentor pajak.

3. Kalau dilihat dari segi penerimaan pajak apakah UIN sudah optimal penerimaan pajaknya pak?

Kalau optimalisasi, harapan kita semuanya optimal. Optimal itu kan terngtung banyak faktor, terutama penyelenggara kegiatan. Ketika sudah dianggarkan kemudian tertunda sehingga anggarannya tidak jadi dikeluarkan dan pajaknya tidak jadi dipotong, tapi sejauh ini pajak UIN sudah bagus. Tahun lalu itu penghasilannya 9,6 Milliar. Kemungkinannya bisa terjadi wajib pajak tidak melaporkan penghasilannya secara keseluruhan. Tapi kalau penghasilan dari gaji pokoknya itu sudah pasti.

Karena mekanisme sekarang ada yang berjalan ada yg tidak. kalau penghasilan dosen bisa kemungkinan tidak dilaporkan karena mungkin mereka tidak mengingat. Pemilik NPWP itu harus membayar pajak. kalau PNS itu sudah langsung dipotong pajaknya. Ada pemilik NPWP pegawai, penghasilannya itu tidak ada yang namanya istilahnya memang besarnya sudah seperti itu. Memang mekanismenya seperti itu tapi itu untuk usahawan. Baik pribadi maupun usaha. Mereka diberikan kebebasan untuk melaporkan pajaknya. Atas dasar laporan tersebut kita yang mengawasi.

RIWAYAT HIDUP



NURLINA, Dilahirkan di Bubun Bia Kec. Baroko Kab. Enrekang pada tanggal 03 Mei 1992. Penulis merupakan anak ke-dua dari 3 bersaudara, buah hati dari Ibunda Suryani dan ayahanda Agus. Penulis memulai pendidikan di Sekolah Dasar SDN 98 Tongko pada tahun 2004, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Alla', kemudian pada tahun 2007 penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Enrekang, pada tahun 2010 kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi dan menyelesaikan studi pada tahun 2014.